



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan II
2021

Penyusun:

Penanggung Jawab: Sulaimansyah | Ketua Tim: Widhia Arie P.W |
Penyusun: Y. Purnomoratih | Fahd Faisal | Design Grafis: Safira Nurdianah |
Anggota: Suwatno | Dwi Supriyatno | Endah Rahmiati | Akhmad Sumadi |
Saniansyah | Asparajidi





KAJIAN FISKAL REGIONAL

Triwulan II Tahun 2021

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

“ Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. ”

B.J. Habibie



KATA PENGANTAR

**Kepala Kanwil DJPb
Prov. Kalimantan Selatan**



" Kajian Fiskal Regional merupakan analisis fiskal dan dampak yang dihasilkan dari kebijakan fiskal terhadap perekonomian regional serta analisis atas ekonomi regional dan pengaruhnya terhadap efektivitas fiskal pemerintah regional .

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Kajian Fiskal Regional Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II Tahun 2021 dapat kami susun dan selesaikan secara tepat waktu.. Kajian Fiskal Regional merupakan analisis fiskal dan dampak yang dihasilkan dari kebijakan fiskal terhadap perekonomian regional serta analisis atas ekonomi regional dan pengaruhnya terhadap efektivitas fiskal pemerintah regional. Kajian Fiskal Regional disusun dalam mendukung pencapaian fungsi APBBN terkait alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional. Kajian Fiskal Regional disajikan sebagai alat analisis dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan fiskal pemerintah telah sesuai dengan tujuan makro ekonomi yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian Kajian Fiskal Regional Kalimantan Selatan Triwulan II ini. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan kajian ini, untuk itu masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan kajian selanjutnya. Harapan kami, semoga Kajian Fiskal Regional Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II Tahun 2021 dapat memberikan informasi kepada berbagai pihak dan memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan maupun Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan untuk menunjang perekonomian nasional.

**Banjarmasin, Agustus 2021
Kepala Kanwil DJPb
Provinsi Kalimantan Selatan**



Sulaimansyah



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS INDIKATOR EKONOMI REGIONAL	
A. Produk Domestik Regional Bruto	1
B. Inflasi	2
C. Indikator Kesejahteraan	3
BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN	
A. Pendapatan Negara.....	6
B. Belanja Negara	8
C. Prognosis Realisasi APBN.....	10
BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD	
A. Pendapatan Daerah.....	13
B. Belanja Daerah	16
C. Prognosis Realisasi APBD.....	18
BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN	
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian	20
B. Pendapatan Konsolidasian	20
C. Belanja Konsolidasian.....	22
D. Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB	24
BAB V BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH	
A. Pemetaan Sektor Unggulan Kalimantan Selatan	25
B. Sektor Unggulan Kalimantan Selatan, Kebun Sawit Serap Lebih Dari 70 Ribu Pekerja	25
LAMPIRAN	
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 APBN Provinsi Kalimantan Selatan s.d. Triwulan II 2020 dan 2021 (Dalam Miliar Rp)	6
Tabel 2.2 Prognosis Pendapatan APBN Kalimantan Selatan Sampai Akhir 2021 (Dalam Miliar Rp)	11
Tabel 2.3 Prognosis Belanja APBN Kalimantan Selatan Sampai Akhir 2021	11
Tabel 3.1 Ringkasan APBD Agregat Provinsi Kalimantan Selatan Sampai Dengan Triwulan II 2021 (Dalam Miliar Rp)	13
Tabel 3.2 Dukungan Pemda Melalui APBD untuk PC-PEN	18
Tabel 3.3 Prognosis Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Selatan (Dalam Miliar Rp)	19
Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Provinsi Kalimantan Selatan s.d. Triwulan II 2021 (Dalam Miliar Rp)	20
Tabel 4.2 Hubungan Belanja Pemerintah dengan Indikator Ekonomi Regional	24

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Perbandingan Persentase Perubahan Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2021	1
Grafik 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan dan Nasional.....	2
Grafik 1.3 Tingkat Inflasi per Kelompok Pengeluaran Provinsi Kalimantan Selatan Juni 2021.....	2
Grafik 1.4 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.....	3
Grafik 1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan	3
Grafik 1.6 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan	4
Grafik 1.7 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Ekonomi Makro dan Kesejahteraan Ekonomi.....	4
Grafik 2.1 Delapan Sektor Penerimaan Perpajakan Tertinggi	6
Grafik 2.2 Target dan Realisasi Kepabeanan dan Cukai Triwulan II 2021	7
Grafik 2.3 PNBPN Kalsel Januari – Juni 2020	8
Grafik 2.4 Pagu dan Realisasi Belanja Negara per Fungsi.....	9
Grafik 2.5 Pagu dan Realisasi TKDD (Dalam Miliar Rp).....	9
Grafik 2.6 Belanja Satker BLU RS Bhayangkara Banjarmasin	10
Grafik 2.7 Penyaluran KUR dan UMi Lingkup Kalimantan Selatan.....	10
Grafik 3.1 Perubahan Pagu Pendapatan dan Belanja APBD Kalimantan Selatan	12
Grafik 3.2 Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.....	13
Grafik 3.3 Realisasi Pajak Daerah Kalimantan Selatan Triwulan II 2020 dan 2021	14
Grafik 3.4 Realisasi Retribusi Daerah Kalimantan Selatan Triwulan II 2020 dan 2021	14
Grafik 3.5 Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah Dipisahkan Kalimantan Selatan Triwulan II 2020 dan 2021.....	15
Grafik 3.6 Realisasi Pendapatan Transfer Kalimantan Selatan Triwulan II	16
Grafik 3.7 Komposisi Belanja Daerah Kalimantan Selatan Triwulan II 2021	16

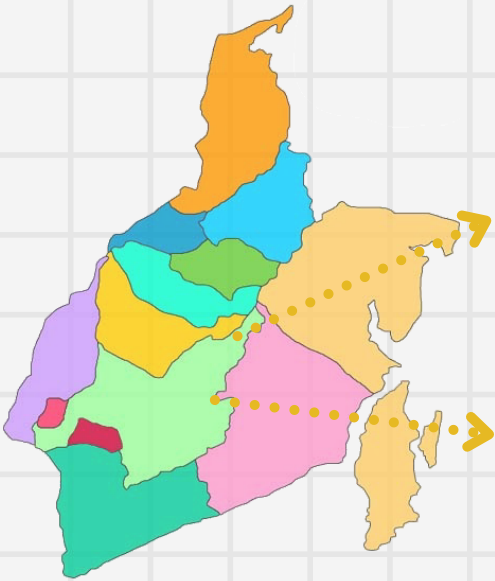
Grafik 3.8 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II 2021	16
Grafik 3.9 Komposisi Belanja Operasional Kalimantan Selatan.....	17
Grafik 3.10 Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Fungsi	17
Grafik 3.11 Prognosis Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	18
Grafik 4.1 Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Kalsel s.d. TW II 2021 (Dalam Miliar Rp)	21
Grafik 4.2 Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Kalsel s.d. TW II 2021	21
Grafik 4.3 Realisasi Pendapatan Konsolidasian dengan PDRB Kalsel (Dalam Miliar Rp)	22
Grafik 4.4 Perbandingan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah (Dalam Miliar Rp)....	22
Grafik 4.5 Proporsi Belanja Konsolidasian Triwulan II 2020	23
Grafik 4.6 Perubahan Jenis Belanja Daerah (Dalam Miliar Rp)	23
Grafik 5.1 Proyeksi Produksi CPO	25
Grafik 5.2 Tren Harga CPO.....	25
Grafik 5.3 Ekspor CPO.....	25
Grafik 5.4 Proyeksi Lapangan Usaha CPO	25



INDIKATOR EKONOMI MAKRO KALIMANTAN SELATAN

TRIWULAN II TAHUN 2021

Pertumbuhan Ekonomi Kalsel (Juni 2021)



q to q
5,49%

Y o Y
4,40%

Tingkat Kemiskinan



Penduduk Miskin:
208,11 Ribu Jiwa



Tingkat Kemiskinan:
4,83%

Garis Kemiskinan Komoditi
Makanan: **71,50%**

Tingkat Pengangguran Terbuka



TPAK **69,08%** TPT **4,33%**

2,10 Juta orang bekerja

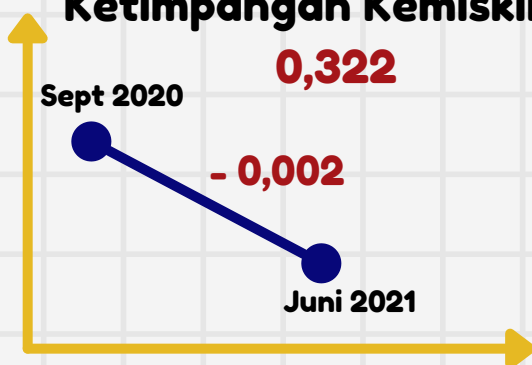
95 Ribu tidak bekerja



Didominasi oleh Lulusan SMA
Kejuruan

Gini Ratio

Ketimpangan Kemiskinan
0,322



INFLASI

Deflasi IHK
0,35% **107,63**



Indeks Pembangunan Manusia



IPM Kalsel per Februari 2021
70,91%



2010 s.d. 2020

Rata-Rata IPM Kalsel
0,88%

NILAI TUKAR PETANI

per Juni 2021
106,71



APBN KALIMANTAN SELATAN

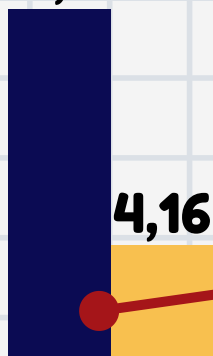
TRIWULAN II TAHUN 2021

Pendapatan dan Hibah

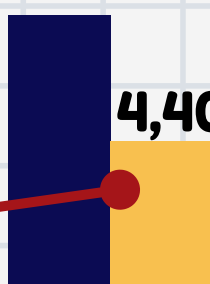
Pendapatan Dalam Negeri

— Target — Realisasi

13,03 M



9,83 M



2020

2021

TKDD



Dana Alokasi Umum

Rp4,06 T

DAK Fisik

Rp169,46 M



Badan Layanan Umum

Belanja

RS Bhayangkara

Rp20,79 M

(89,34%)

Kredit Usaha Rakyat

Realisasi

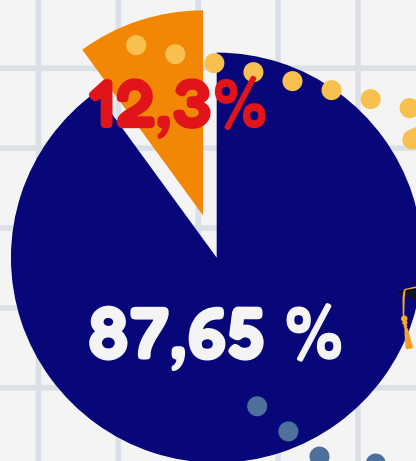
Rp1,99 T

kepada

52.088 debitur



Perpajakan — PNBP



Jasa Kepelabuhan

35,18%

Jasa Pendidikan

31,10%

Pertambangan dan Penggalian

26,49%

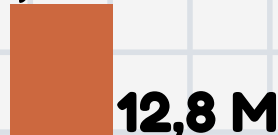
Perdagangan Besar dan Eceran

24,40%

Belanja Pemerintah Pusat

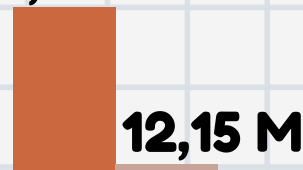
— Pagu — Realisasi

25,03 M



2020

25,08 M



2021

Prognosis Realisasi APBN

Menggunakan Permodelan
ARIMA Box-Jenkins

APBD KALIMANTAN SELATAN

TRIWULAN II TAHUN 2021

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah Rp1,49 T

Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor

Rp495,25 M



Retribusi Daerah

Rp65,12 M

Pelayanan Persampahan/
Kebersihan

Rp7,72 M



Lain-Lain PAD yang Sah

Rp603,47 M

Pendapatan Daerah

— Target — Realisasi

23,95 T

23,69 T

10,91 T

10,63 T

2020

2021

**Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan**

Rp158,49 M

Belanja Daerah

— Pagu — Realisasi

27,41 T

26,92 T

7,99 T

8,41 T

2020

2021

Klasifikasi Ekonomi



Belanja Pegawai

Rp4,23 T

Belanja Barang

Rp2,12 T



Klasifikasi Fungsi

**Ketertiban dan
Keamanan**

(42,94%)



Pendidikan

Rp2,76 T

(30,86%)



REALISASI PENYALURAN • PEN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Sumber: Ditpa Kemenkeu; cut off 30 Juni 2021



Klaster Kesehatan

Klaim Pasien senilai Rp195,05 Miliar kepada 2.854 pasien dan 51 RS



Klaster Perlindungan Sosial

Program	Miliar Rp	Ket
PKH	Rp127,87 M	183.092 KPM
BPNT	Rp180,82 M	904.117 KPM
BST	Rp134 M	446.680 KPM
Kartu Prakerja	Rp217,02 M	61.133 KPM
BLT	Rp184,13 M	613.767 KPM
Subsidi Internet	Rp10,88 M	375.539 PM



PRIORITY

Klaster Prioritas

Program Padat Karya

K/L	Miliar Rp	Ket
Kemen PUPR	Rp216,37 M	10.726 Orang
Kemenhub	Rp15,47 M	470 Orang
Kementan	Rp15,23 M	4.582 Orang

Food Estate

Realisasi Program Food Estate Kementan Rp607,95 Juta

Dukungan Pemda

Penanganan COVID-19	Rp46,83 M
Dukungan Vaksinasi	Rp4,10 M
Dukungan Kelurahan	Rp3,47 M
Insentif Nakes Daerah	Rp52,93 M
Belanja Kesehatan Lainnya	Rp94,29 M

Klaster Dukungan UMKM

BPUM

Realisasi Program BPUM Rp150,40 M kepada 125.335 Penerima Manfaat

Penempatan Dana di BPD Kalsel

Penempatan Dana di BPD Kalsel senilai Rp200 Miliar dengan daya ungkit 2x. Dana tsb telah tersalur Rp142 Miliar



EXECUTIVE SUMMARY

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II 2021 tumbuh sebesar 4,40 persen secara Y on Y. Secara Q to Q, ekonomi Kalimantan Selatan Triwulan II 2021 tumbuh 5,49 persen. Dalam struktur PDRB Kalimantan Selatan Triwulan II 2021, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 32,26 persen di sisi produksi, serta komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 43,20 persen di sisi pengeluaran.

Selain kinerja pertumbuhan ekonomi, capaian Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan memasuki tahun ke dua pandemi Covid-19 belum seluruhnya optimal sebagaimana target makro ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021, yaitu: 1) tingkat deflasi 0,35 persen, jauh dibawah target inflasi yang ditetapkan sebesar 5 persen; 2) Tingkat kemiskinan 4,83 persen, lebih tinggi dari target sebesar 4,01 persen; 3) nilai Gini ratio 0,351, lebih tinggi dari nilai target 0,286; 4) Tingkat Pengangguran Terbuka 4,33 persen, lebih tinggi dari target sebesar 3,60 persen; dan 5) nilai IPM 70,91, lebih rendah dari nilai target 71,80.

Sampai dengan Triwulan II 2021, kinerja realisasi pendapatan APBN di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp4,40 Triliun atau 44,74 persen dari target, tumbuh 5,75 persen secara YoY yang didominasi hingga 26,49 persen dari penerimaan perpajakan sektor Pertambangan dan penggalian sebagai sektor unggulan di Kalimantan Selatan. Kinerja realisasi belanja APBN di Provinsi Kalimantan Selatan s.d. Triwulan II 2021 sebesar Rp12,16 triliun atau 48,46 persen dari pagu, berkontraksi 5,38 persen secara YoY karena penurunan realisasi TKDD hingga 14,76 persen.

Sementara itu, kinerja realisasi pendapatan Daerah Agregat Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp10,58 triliun atau 44,66 persen YoY dari target APBD. Pendapatan Daerah mengalami kontraksi 3,03 persen YoY. Belanja Daerah Agregat Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp8,93 triliun atau 33,18 persen dari Pagu APBD, tumbuh positif sebesar 11,76 persen YoY. Adapun dukungan belanja Daerah melalui APBD *earmarking* 8 persen atas alokasi DanaTransfer Umum dalam DAU dan DBH yang ditujukan untuk PC-PEN telah dipenuhi oleh seluruh Pemda di wilayah Kalimantan Selatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp751,12 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp201,63 miliar.

Secara konsolidasian, realisasi pendapatan Negara di wilayah Kalimantan Selatan s.d. Triwulan II 2021 sebesar Rp6.922,33 miliar naik 1,71 persen YoY. Sedangkan realisasi belanja konsolidasian terealisasi sebesar Rp13.028,07 miliar naik 3,64 persen YoY.

BAB I

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS INDIKATOR EKONOMI REGIONAL



Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II Tahun 2021 secara YoY mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen dengan nilai PDB Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp4.175,8triliun.

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan II Tahun 2021 secara YoY tumbuh sebesar 4,40 persen atau dengan nilai PDRB ADHB sebesar Rp 47,60 triliun.

BAB I

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS INDIKATOR EKONOMI REGIONAL

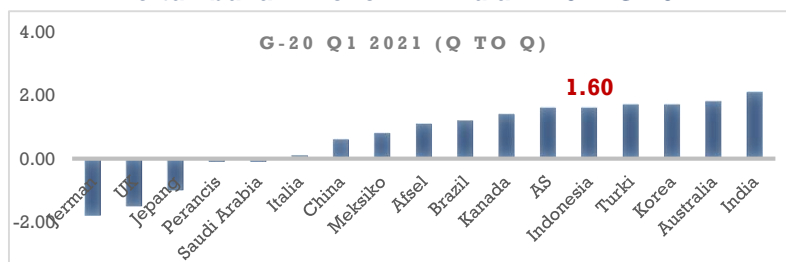
POIN UTAMA

- *Ekonomi Kalimantan Selatan pada Triwulan II 2021 tumbuh 4,40 persen YoY atau 5,49 persen QtQ. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor potensial di Provinsi Kalimantan Selatan (QtQ) yaitu sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan hingga 32,26 persen.*
- *Pada triwulan II 2021, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami deflasi 0,35 persen, dengan IHK sebesar 107,63.*
- *Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan pada Maret 2021 mencapai 208,11 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 4,83 persen, meningkat 0,45 persen.*
- *Pada Maret 2021, tingkat Gini Ratio Kalimantan Selatan 0,332 atau turun 0,002 poin dibanding pada September 2020.*
- *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Selatan sebesar 69,08 persen dan TPT sebesar 4,33 persen meningkat 0,66 poin dibandingkan periode sebelumnya.*
- *IPM Kalimantan Selatan pada tahun 2021 mencapai 70,72 atau meningkat sebesar 0,78 persen secara YoY.*
- *NTP Kalimantan Selatan pada Juni 2021 106,71, turun 0,57 persen dibanding Mei 2021 karena It turun 0,45 persen sementara Ib naik 0,12 persen.*

A. Produk Domestik Regional Bruto

Kondisi perekonomian Indonesia terus membaik hingga akhir Triwulan I 2021, bahkan dibandingkan perkembangan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN dan G-20.

Grafik 1.1 Perbandingan Persentase Perubahan Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2021 G-20



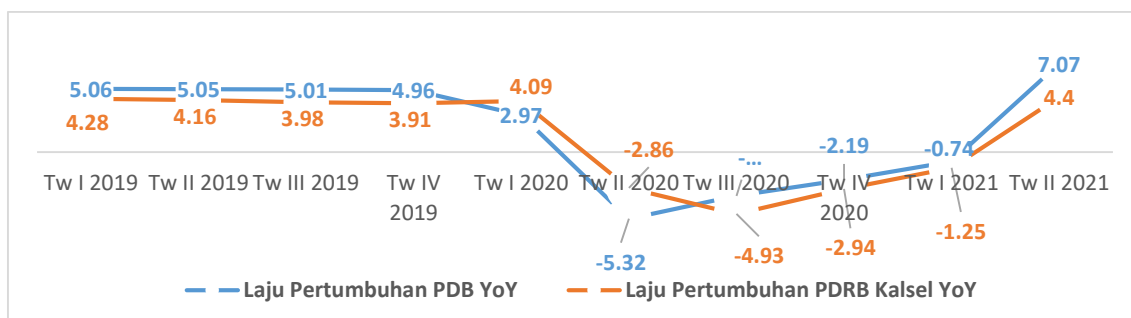
Sumber: OECD, 2021

Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2021 secara YoY mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen dengan nilai PDB Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp4.175,8 triliun. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,10 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,78 persen. Struktur Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2021 tumbuh di seluruh kelompok pulau, dan didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 57,92 persen.

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan II Tahun 2021 secara YoY tumbuh sebesar 4,40 persen atau dengan nilai PDRB ADHB sebesar Rp 47,60 triliun. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,64 persen. Dari sisi pengeluaran, kontribusi Impor menjadi penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 30,94 persen.

Untuk Q to Q dengan triwulan I 2021, perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan meningkat sebesar 5,49 persen. Di sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha sektor potensial di Kalimantan Selatan yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 32,26 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh pengeluaran konsumsi Pemerintah yang tumbuh hingga 43,20 persen.

Grafik 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan dan Nasional



Sumber: BPS Kalsel (diolah)

Peran pengeluaran konsumsi Pemerintah dalam mendorong tingkat PDRB terjadi di level Belanja K/L atas beban APBN maupun belanja Daerah dalam APBD. Peningkatan tersebut terjadi di seluruh jenis belanja, baik pegawai, barang, bantuan sosial, dan terutama belanja modal. Pada belanja Pegawai, terdapat pembayaran THR dan Gaji ke-13 di bulan Mei dan Juni 2021. Pada belanja Bantuan Sosial, peningkatan terjadi sejalan dengan upaya penanganan dampak pandemi dan pemulihan ekonomi. Pada belanja Modal, terdapat peningkatan baik pada alokasi dan realisasi sejalan dengan kebijakan reformasi structural.

B. Inflasi

Pada triwulan II 2021, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami deflasi 0,35 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,63. Komoditas pembentuk deflasi tertinggi adalah angkutan udara, cabai, daging ayam ras, dan bawang merah.

Grafik 1.3 Tingkat Inflasi per Kelompok Pengeluaran Kalimantan Selatan Juni 2021



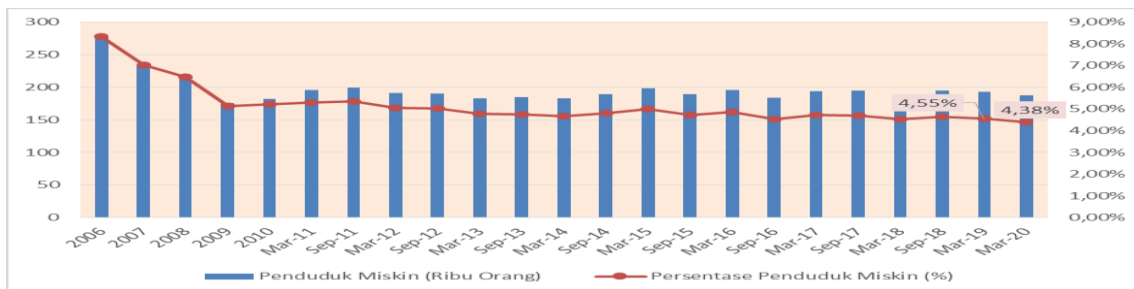
Sumber: BPS Kalsel (diolah)

C. Indikator Kesejahteraan

1. Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan pada Maret 2021 mencapai 208,11 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 4,83 persen atau meningkat 0,45 persen. Penduduk miskin di wilayah perkotaan tercatat 81,12 ribu orang dengan tingkat kemiskinan 3,89 persen dan jumlah penduduk miskin di pedesaan tercatat 126,99 ribu orang dengan tingkat kemiskinan 5,71 persen. Komoditi makanan mendominasi pembentukan garis kemiskinan dengan porsi sebesar 71,50 persen.

Grafik 1.4 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan



Sumber: BPS Kalsel (diolah)

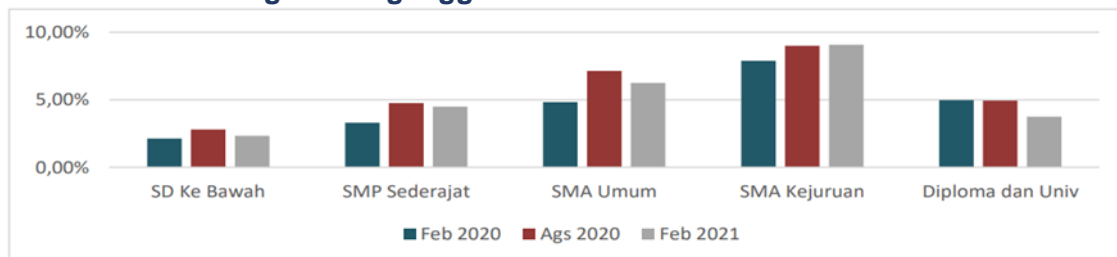
2. Gini Ratio

Pada Maret 2021, tingkat ketimpangan kemiskinan atau *Gini Ratio* Kalimantan Selatan tercatat 0,332 atau menurun sebesar 0,002 poin dibandingkan September 2020. Ketimpangan penduduk pedesaan lebih baik dibanding daerah perkotaan.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah angkatan kerja Provinsi Kalimantan Selatan pada Februari 2021 mencapai 2,20 juta orang terdiri dari 2,10 juta orang yang bekerja dan 95 ribu orang yang menganggur. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Selatan sebesar 69,08 persen dan TPT sebesar 4,33 persen meningkat 0,66 poin dibandingkan Februari 2020.

Grafik 1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan

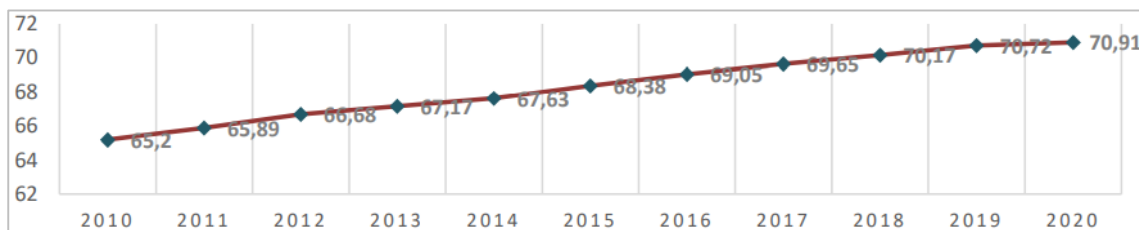


Sumber : BPS Kalsel (diolah)

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Penghitungan IPM Kalimantan Selatan tahun 2020 yang tersaji Februari 2021 mencapai 70,91, lebih tinggi sebesar 0,27 persen YoY. Selama periode tahun 2010 hingga tahun 2020, rata-rata pertumbuhan IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0,88 persen per tahun.

Grafik 1.6 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan



Sumber: BPS Kalsel (diolah)

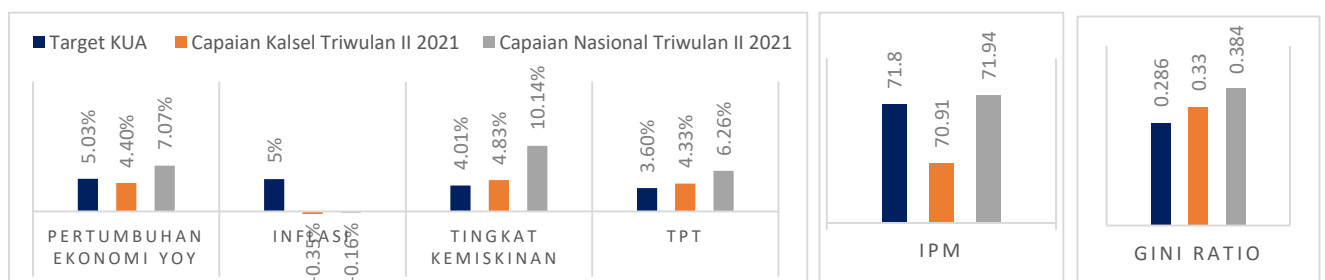
5. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) gabungan Kalimantan Selatan pada Bulan Juni 2021 mencapai 106,71 atau turun 0,57 persen dibanding posisi Mei 2021. Penurunan tersebut lebih diakibatkan penurunan indeks harga yang diterima petani (It) 0,45 persen, sementara indeks yang harus dibayar (Ib) naik 0,12 persen.

6. Perbandingan Indikator Makroekonomi dan Kesejahteraan dengan KUA Kalimantan Selatan

Kinerja pertumbuhan ekonomi Kalsel pada triwulan II 2021 mengalami pertumbuhan 4,40 persen YoY. Pada bulan Juni 2021, Kalimantan Selatan mengalami deflasi 0,35 persen, jauh dibawah target KUA yang ditetapkan sebesar 4,01 persen. Sektor transportasi mengalami deflasi terbesar yaitu 3,30 persen yang disebabkan pengetatan atas persyaratan penerbangan di seluruh wilayah. Pemberlakuan PPKM Darurat di Kalimantan Selatan berpotensi mengakibatkan pelemahan di kuartal III 2021 yang harus diwaspadai oleh masyarakat dan Pemerintah.

Grafik 1.7 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Ekonomi Makro dan Kesejahteraan Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II 2020



Sumber: BPS Kalsel dan RPJMD (diolah)

BAB II

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN



Pendapatan APBN di Provinsi Kalimantan Selatan secara agregat sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 sebesar Rp4,40 triliun atau mencapai 44,74 persen dari target pendapatan Tahun 2021.

Pendapatan APBN di Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Triwulan II 2021 tumbuh 5,75 persen secara YoY yang dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi pada semester I 2021.

BAB II

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

POIN UTAMA

- *Realisasi pendapatan APBN di Provinsi Kalimantan Selatan s.d. Triwulan II 2021 mencapai Rp4,40 Triliun atau 44,74 persen dari target, tumbuh 5,75 persen secara YoY, didominasi penerimaan perpajakan dengan porsi 87,65 persen.*
- *Pertambahan dan penggalian sebagai sektor unggulan di Kalimantan Selatan, s.d. Triwulan II 2021 menjadi penyumbang tertinggi penerimaan perpajakan hingga 26,49 persen.*
- *Realisasi belanja APBN di Provinsi Kalimantan Selatan s.d. Triwulan II 2021 sebesar Rp12,16 triliun atau 48,46 persen dari pagu, berkontraksi 5,38 persen secara YoY karena penurunan realisasi TKDD hingga 14,76 persen.*
- *Realisasi Belanja Modal Pemerintah Pusat di Provinsi Kalimantan Selatan s.d. Triwulan II 2021 meningkat hingga 125 persen secara YoY, sejalan dengan kebijakan reformasi struktural.*
- *Proyeksi optimis pendapatan APBN hingga akhir 2021 diperkirakan mencapai Rp10.309,3 miliar. Sedangkan proyeksi belanja APBN pada kondisi extraordinary diperkirakan sebesar Rp22.994,7 miliar di Triwulan III dan Rp25.890,7 miliar di Triwulan IV 2021.*

Pemulihan ekonomi di Indonesia menunjukkan hasil yang semakin nyata. Kebijakan APBN 2021 diarahkan *countercyclical* untuk pertumbuhan ekonomi, serta dilaksanakan secara responsif dan fleksibel. Dari sisi pendapatan negara, kinerja positif ditunjukkan oleh pertumbuhan negara semester I 2021 sebesar Rp886,9 triliun atau tumbuh 9,1 persen YoY. Sementara itu, Belanja Negara diakselerasi untuk mendukung pengendalian COVID-19 dan Program PEN seperti vaksinasi, penanganan kesehatan, bantuan sosial dan bantuan untuk usaha mikro. Belanja Negara pada semester I 2021 tercatat sebesar Rp1.170 triliun atau tumbuh 9,4 persen YoY.

Pendapatan APBN di Provinsi Kalimantan Selatan secara agregat sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 sebesar Rp4,40 triliun atau mencapai 44,74 persen dari target pendapatan Tahun 2021. Penerimaan Perpajakan merupakan sumber pendapatan yang paling mendominasi realisasi pendapatan APBN dengan porsi sebesar 87,65 persen dari total pendapatan. Pendapatan APBN di Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Triwulan II 2021 tumbuh 5,75 persen secara YoY yang dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi pada semester I 2021.

Belanja TKDD mengalami kontraksi sebesar 14,76 persen secara YoY yang disebabkan lambatnya proses pengadaan barang dan jasa pada pencairan DAK Fisik. Belanja Kementerian Negara/Lembaga (satker K/L) mengalami peningkatan hingga 26,17 persen secara YoY yang diakibatkan peningkatan seluruh komponen belanja pemerintah pusat, terutama belanja modal yang meningkat hingga 125 persen YoY.

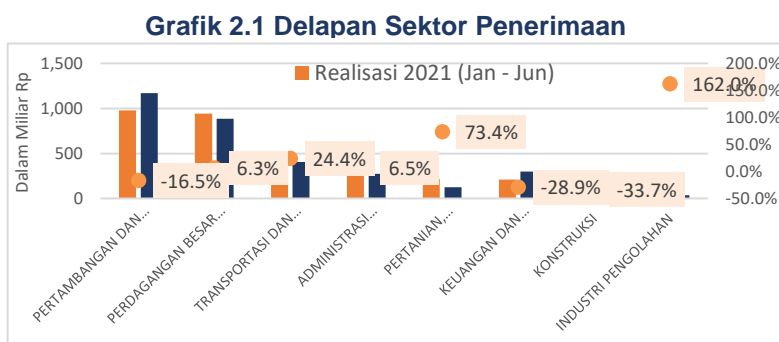
Tabel 2.1 APBN Provinsi Kalimantan Selatan Sampai Dengan Triwulan II 2021 Dan 2020
(Dalam Miliar Rp)

Uraian	Semester I 2020			Semester I 2021			Δ (%)
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
A. Pendapatan dan Hibah	13.038,29	4.162,08	31,92%	9.836,75	4.401,24	44,74%	5,75%
I. Pendapatan Dlm Negeri	13.038,29	4.162,08	31,92%	9.836,75	4.401,24	44,74%	5,75%
1. Perpajakan	11.999,46	3.547,28	29,56%	8.963,71	3.857,51	43,03%	8,75%
2. PNBP	1.038,83	614,79	59,18%	873,04	543,74	62,28%	-11,56%
B. Belanja Negara	25.036,26	12.846,76	51,31%	25.085,32	12.155,79	48,46%	-5,38%
I. Belanja Pem Pus	7.938,26	2.945,83	37,11%	8.815,33	3.716,61	42,16%	26,17%
II. TKDD	17.098,00	9.900,93	57,91%	16.269,99	8.439,18	51,87%	-14,76%
C. Keseimbangan Primer	-	-	-	-	-	-	-
D. Surplus/Defisit Anggaran	-11.997,97	-8.684,68	72,38%	-14.997,86	-7.754,54	-10,71%	

Sumber : GFS (diolah)

A. Pendapatan Negara

1. Penerimaan Perpajakan



Sumber : Kanwil DJP Kalselteng (diolah)

Target Penerimaan Pajak di Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah pada tahun 2021 mengalami penurunan target sebesar Rp250 Miliar pasca reorganisasi Direktorat

Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor KEP-329/WPK.29/2021 tanggal 15 Juni 2021. Penerimaan Perpajakan mendominasi hingga 87,65 persen dari total pendapatan. Realisasi Penerimaan Perpajakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 sebesar Rp3,86 triliun atau 43,03 persen dari target tahun 2021, tumbuh 8,75 persen YoY yang disebabkan pertumbuhan kembali aktivitas ekonomi masyarakat dibandingkan semester I 2020 yang sempat turun karena PSBB.

Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor usaha dengan potensi penerimaan perpajakan tertinggi yaitu Rp977,17 miliar atau 26,49 persen terhadap total. Sektor perdagangan besar dan eceran di posisi tertinggi kedua dalam penerimaan pajak di Kalimantan Selatan sebesar Rp941,95 miliar, sesuai dengan posisi strategis Kalimantan Selatan bagi sektor perdagangan di wilayah Kalimantan.

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Provinsi Kalimantan Selatan hingga Triwulan II Tahun 2021 mencapai Rp1,79 triliun atau berkontribusi sebesar 51,67 persen

dari total penerimaan perpajakan. Penerimaan PPh mengalami kontraksi 22,82 persen atau Rp528,68 miliar secara YoY yang disebabkan insentif PPh (PPh DTP) belum seluruhnya tercatat di masa pandemi. Tren penerimaan PPh mencapai puncaknya pada bulan April 2021 sebesar Rp446,50 yang disebabkan imbas dari pelunasan pajak PPh Pasal 25/29 Badan tahun lalu yang tercatat *closing* pada bulan April.

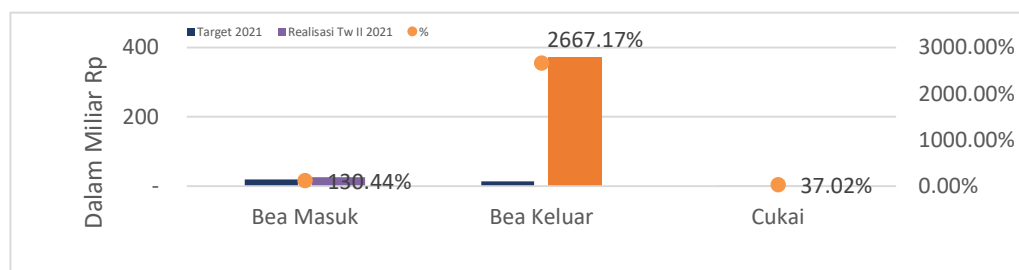
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penerimaan PPN di Triwulan II Tahun 2021 tercatat sebesar Rp1,55 triliun atau 31,78 persen dari total penerimaan perpajakan. Penerimaan PPN mengalami pertumbuhan positif hingga 38,34 persen secara YoY. Pertumbuhan ini disebabkan peningkatan aktivitas jual beli masyarakat di semester I 2021 dibandingkan semester 1 2020 yang mengalami PSBB. Kota Banjarmasin memberikan kontribusi terbesar pada penerimaan PPN sebesar Rp474,76 miliar (29,44 persen).

c. Pajak Perdagangan Internasional dan Cukai

Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sampai dengan triwulan II 2021 sebesar Rp396,33 miliar, naik signifikan hingga 963 persen YoY didorong oleh peningkatan kinerja ekspor dan impor nasional terutama perdagangan besar/eceran dan industri pengolahan. Secara umum, Neraca Perdagangan di Kalimantan Selatan surplus hingga 2,17 miliar US\$.

Grafik 2.2 Target dan Realisasi Kepabeanaan dan Cukai Triwulan II 2021 (Dalam Miliar Rp)



Sumber: Kanwil DJBC Kalbagsel (diolah)

Penerimaan Bea Masuk sampai dengan triwulan II 2021 sebesar Rp26,13 miliar atau berkontribusi 6,59 persen terhadap total realisasi pajak perdagangan internasional. Secara YoY, penerimaan bea masuk Triwulan II Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 8,83 persen. Komoditas Bahan Bakar Mineral, Minyak Mineral dan Produk Sulingannya, Zat Mengandung Bitumen, Malam Mineral menyumbang devisa impor terbesar di Kalimantan Selatan hingga 66,22 juta US\$.

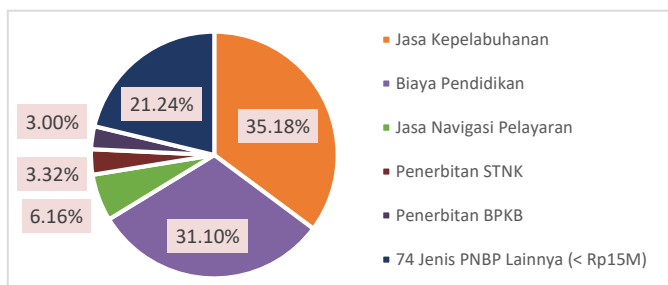
Penerimaan Bea Keluar sampai dengan triwulan II 2021 sebesar Rp370,19 miliar atau 2.667 persen terhadap target 2021 sebesar Rp13,88 miliar. Penerimaan Bea Keluar diperoleh dari ekspor produk CPO dan turunannya. PT Adaro Indonesia

merupakan eksportir penyumbang devisa ekspor terbesar dengan komoditas batubara senilai 960,40 juta US\$.

Penerimaan Cukai di Kalimantan Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 sebesar Rp243,94 juta atau mencapai 37,2 persen dari target, terkontraksi hingga 70,92 persen YoY akibat penurunan produksi hasil tembakau di Kalimantan Selatan.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Grafik 2.3 PNBP Kalsel Januari-Juni 2020



Sumber : GFS (diolah)

Realisasi PNBP di Kalimantan Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 sebesar Rp543,74 miliar atau mencapai 62,28 persen dari target PNBP Tahun 2021. Capaian realisasi PNBP sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 mengalami

kontraksi sebesar Rp71,06 miliar atau 11,56 persen YoY karena ada beberapa jenis PNBP yang tercatat di semester I 2020, namun tidak tercatat di periode semester I 2021 misalnya pendapatan wisata alam (425611) sebesar Rp142,50 juta.

Capaian Penerimaan PNBP Lainnya didominasi oleh Jasa Kepelabuhanan sebesar Rp180,52 miliar atau 35,18 persen dari total penerimaan PNBP di Kalimantan Selatan yang tumbuh 4,3 persen YoY, dengan kontribusi terbesar dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin dan Kotabaru-Batulicin. Peningkatan tersebut didorong aktivitas ekonomi masyarakat terutama di jasa kepelabuhanan. Penerimaan Biaya Pendidikan memberikan kontribusi terbesar kedua yaitu Rp159,59 miliar atau 31,10 persen. Namun dalam hal ini, terdapat data kewajiban penyeteroran PNBP SDA yang belum dapat di akses secara spasial sebagai bahan monitoring dan evaluasi di Daerah, mengingat data PNBP SDA tersebut menjadi dasar bagi alokasi DBH Kalimantan Selatan yang sudah tergolong tinggi.

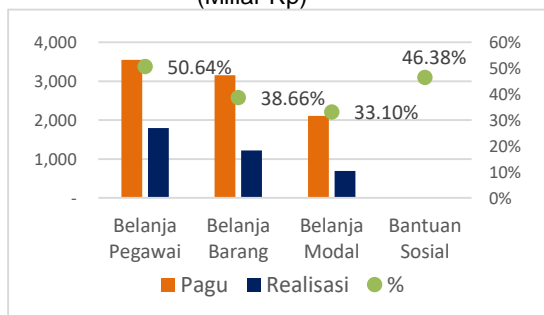
B. Belanja Negara

Realisasi Belanja APBN di Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 telah mencapai Rp12,16 triliun atau sebesar 48,46 persen dari pagu sebesar Rp25,08 triliun, terkontraksi 5,38 persen YoY yang disebabkan penurunan realisasi belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa hingga 14,76 persen.

1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Berdasarkan klasifikasi ekonomi, realisasi belanja modal sampai dengan triwulan II 2021 sebesar Rp697,35 miliar atau mengalami peningkatan hingga 125 persen YoY, sejalan dengan kebijakan reformasi struktural yang ditetapkan Pemerintah.

Grafik 2.4 Pagu dan Realisasi Belanja K/L
(Miliar Rp)



Sumber : GFS (diolah)

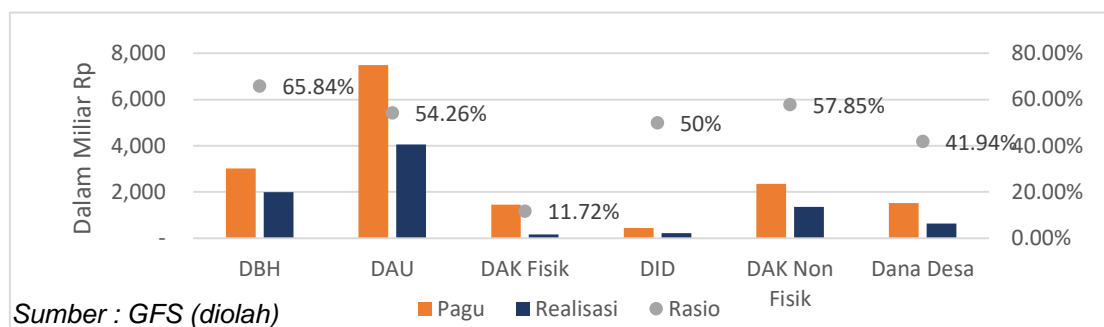
Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) memerlukan adanya peran/kontribusi APBD Kalimantan Selatan.

Belanja fungsi pendidikan memperoleh alokasi Rp2,32 triliun atau 18,21 persen dari total belanja pemerintah K/L. Guna mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang

2. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, realisasi TKDD Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp8,44 triliun atau 51,87 persen dari pagu sebesar Rp16,27 triliun.

Grafik 2.5 Pagu dan Realisasi TKDD (Dalam Miliar Rp)



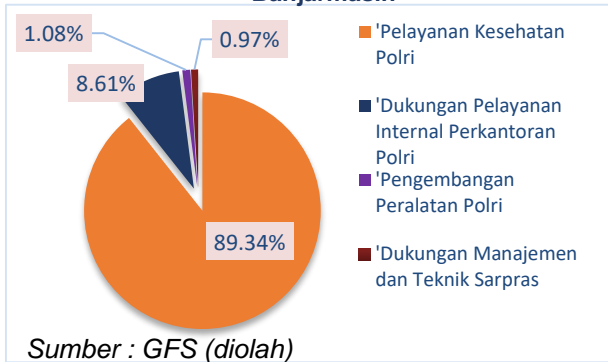
Sumber : GFS (diolah)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan jenis TKDD yang memperoleh alokasi tertinggi yaitu Rp7,49 triliun dan telah terealisasi Rp4,06 triliun atau 54,26 persen terhadap pagu.

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) di Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan II 2021 sebesar Rp169,46 miliar atau 11,72 persen terhadap pagu Rp1,45 triliun. Pemerintah Daerah mengalami sejumlah kendala seperti keterlambatan pengadaan barang dan jasa yang diakibatkan bencana banjir dan belum tersedianya barang di *e-catalog* di awal tahun 2021. Atas hal tersebut, kepada Pemerintah Daerah disarankan untuk berkoordinasi antar SKPD terkait dan merumuskan Harga Perkiraan Sendiri sebagai dasar penetapan batas tertinggi untuk pengadaan penawaran yang sah untuk pengadaan merumuskan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar penetapan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan

2. Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

Grafik 2.6 Belanja Satker BLU RS Bhayangkara Banjarmasin



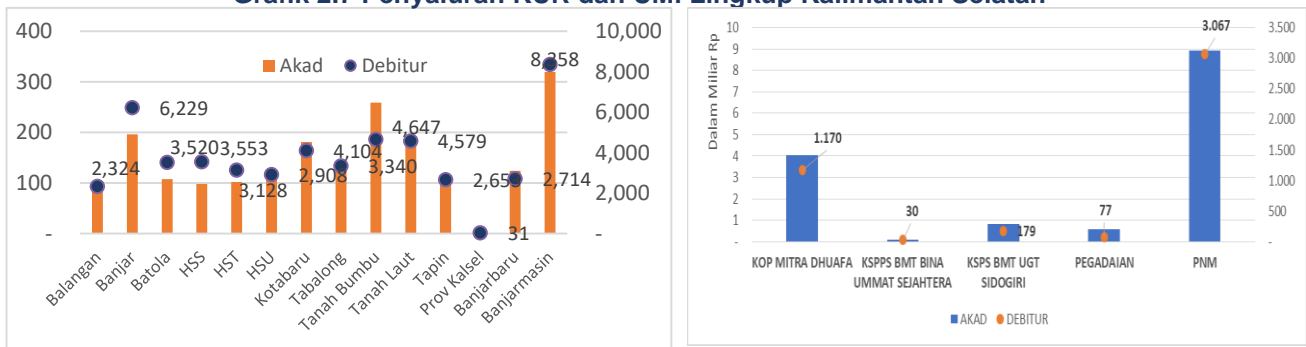
Rumah Sakit Bhayangkara Kelas III Banjarmasin merupakan satu-satunya Satker Badan Layanan Umum (BLU) di Provinsi Kalimantan Selatan. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, realisasi pendapatan BLU di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp30,57 miliar atau 85,10 persen dari target sebesar Rp35,92 miliar. Dari sisi

belanja, sampai dengan Juni 2021 realisasi Belanja BLU mencapai sebesar Rp23,27 miliar.

3. Manajemen Investasi Pusat

Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 telah mencapai Rp1,99 triliun yang tersalur kepada 52.088 debitur. Dari sisi sektor Sektor Usaha penerima KUR, jenis usaha Perdagangan besar dan eceran merupakan yang terbesar dalam penyaluran KUR dengan nilai sebesar Rp952,63 miliar dan jumlah debitur sebanyak 22.913. Sementara itu, realisasi Kredit Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp14,45 miliar dengan 4.523 debitur.

Grafik 2.7 Penyaluran KUR dan UMi Lingkup Kalimantan Selatan



Sumber : SIKP (diolah)

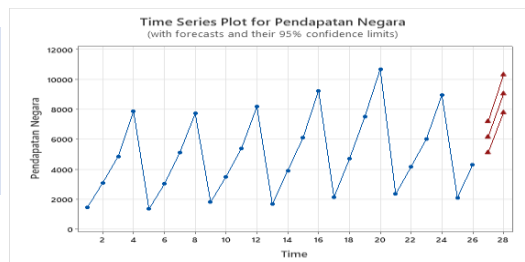
C. Prognosis Realisasi APBN

Perkiraan optimis pendapatan dapat dicapai, didukung oleh membaiknya kinerja penerimaan negara secara Nasional seperti PPh Pasal 21 yang membaik seiring dengan serapan tenaga kerja yang mulai pulih serta PPN DN dan PPN Impor meningkat seiring dengan membaiknya aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat.

Tabel 2.2 Prognosis Pendapatan APBN Kalimantan Selatan Sampai Akhir 2021 (Dalam Miliar Rp)

	Prognosis Pendapatan Negara		
	High	Moderate	Low
Q3	7.186,3	6.154,03	5.121,74
Q4	10.309,3	9.049,17	7.789,08

Sumber : GFS (diolah dengan pemodelan ARIMA Box-Jenkins)



Prognosis belanja Negara dilakukan dengan prosedur yang berbeda dengan prognosis pendapatan Negara. Prognosis Belanja K/L dilakukan berdasarkan proyeksi belanja pada Halaman 3 DIPA. Hasil Proyeksi melebihi pagu dikarenakan proyeksi angka masing-masing jenis belanja telah memperhitungkan nilai blokir. Sedangkan Prognosis Belanja TKDD dilakukan berdasarkan karakteristik penyaluran masing-masing jenis TKDD.

Tabel 2.3 Prognosis Belanja APBN Kalimantan Selatan Sampai Akhir 2021

No.	Jenis Belanja	Pagu 2021 (Miliar Rp)	Realisasi s.d Tw II 2021 (Miliar Rp)	Proyeksi s.d. Tw III (Miliar Rp)	Proyeksi s.d. Tw IV	
					(Miliar Rp)	(% Terhadap Pagu)
1	B. Pegawai	3.548,35	1.796,89	2.697,15	3.575,57	100,77%
2	B. Barang	3.179,31	1.217,77	2.157,47	3.075,22	96,73%
3	B. Modal	2.538,97	697,35	1.707,01	2.678,80	105,51%
4	B. Bansos	9,89	4,59	10,38	11,02	111,43%
Total TKDD		9.276,52	3.716,60	6.572,01	9.340,61	100,69%

No.	Jenis Belanja	Pagu 2021 (Miliar Rp)	Realisasi s.d Tw II 2021 (Miliar Rp)	Proyeksi s.d. Tw III (Miliar Rp)	Proyeksi s.d. Tw IV	
					(Miliar Rp)	(% Terhadap Pagu)
1	DBH	3.019,31	1.988	2.385,25	3.012,66	99,78%
2	DAU	7.486,17	4.062	5.406,36	7.486,17	100,00%
3	DAK Fisik	1.446,49	169	1.064,21	1.374,16	95,00%
4	DID	445,83	223	401,25	445,83	100,00%
5	DAK Non Fisik	2.346,43	1.357	1.789,18	2.346,43	100,00%
6	Dana Desa	1.525,77	640	1.256,95	1.524,94	99,95%
Total TKDD		16.270,00	8.439,18	12.303,20	16.190,19	99,51%

Sumber : Ditpa Kemenkeu dan Simtrada (diolah)

BAB III

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD



Masjid Raya Sabilal, Banjarmasin

Pendapatan Daerah Agregat Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan II 2021 tercatat sebesar Rp10,06 triliun atau 42,46 persen YoY dari target APBD. Pendapatan Daerah mengalami kontraksi 7,79 persen (YoY).

Sementara itu, Belanja Daerah Agregat Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp8,41 triliun atau 31,25 persen dari Pagu APBD. Belanja Daerah mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,26persen YoY

BAB III

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

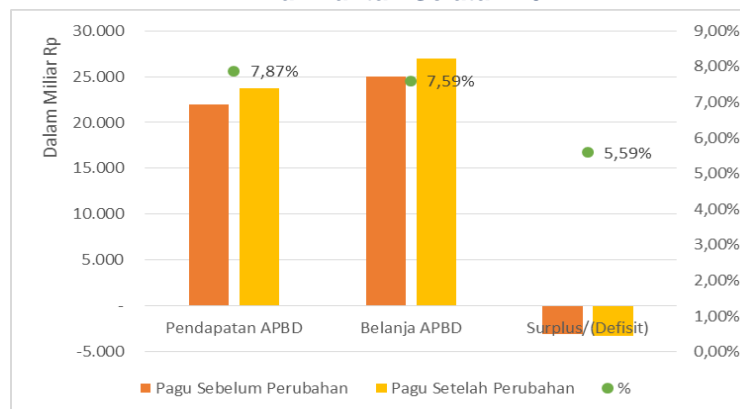
POIN UTAMA

- *Realisasi PAD dalam Pendapatan Daerah sampai Triwulan II 2021 terkontraksi 6,52 persen. Namun Penerimaan Pajak Daerah yang mendominasi PAD, realisasinya tumbuh 2,39 persen YoY.*
- *Belanja modal sampai dengan Triwulan II 2021 tumbuh 2,59 persen YoY, sejalan dengan kebijakan transformasi struktural.*
- *Dukungan belanja Daerah melalui APBD earmarking 8 persen atas alokasi DanaTransfer Umum dalam DAU dan DBH yang ditujukan untuk PC-PEN telah dipenuhi oleh seluruh Pemda di wilayah Kalimantan Selatan.*
- *Proyeksi Pendapatan Daerah Kalimantan Selatan diperkirakan mencapai Rp23,69 triliun atau 99,97 persen dari target APBD pada akhir tahun 2021. Namun dengan kenaikan kasus Covid-19 maka diperkirakan akan mencapai Rp21,78 triliun atau 91,90 persen dari target pada kondisi terburuk.*
- *Proyeksi Belanja Daerah Kalimantan Selatan diperkirakan Rp25,61 triliun atau 95,10 persen dari pagu pada akhir tahun 2021. Namun pada kondisi extraordinary yang dhi berupa kenaikan kasus Covid-19, belanja daerah diperkirakan Rp27,95 triliun atau 103,82 persen dari pagu.*

Pendapatan Daerah Agregat Provinsi Kalimantan Selatan pada awal Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp21,97 triliun, sementara Belanja APBD yang terdiri dari Belanja Daerah dan Transfer Pemda direncanakan sebesar Rp25,03 triliun. Penyebaran pandemic COVID-19 yang terus meningkat di tahun 2021 mengakibatkan Pemerintah harus mengambil langkah *extraordinary* termasuk realokasi APBD. Target Pendapatan Daerah meningkat menjadi Rp23,69 triliun dan Pagu Belanja Daerah meningkat menjadi Rp26,93 triliun.

Pendapatan Daerah Agregat Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan II 2021 tercatat sebesar Rp10,06 triliun atau 42,46 persen dari target APBD. Pendapatan Daerah mengalami kontraksi 7,79 persen (YoY).

Grafik 3.1 Perubahan Pagu Pendapatan dan Belanja APBD Kalimantan Selatan 2021



Sumber: LRA GFS (diolah)

Sementara itu, Belanja Daerah Agregat Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp8,41 triliun atau 31,25 persen dari Pagu APBD. Belanja Daerah mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,26 persen YoY.

Tabel 3.1 Ringkasan APBD Agregat Provinsi Kalimantan Selatan Sampai Dengan Triwulan II 2021 (Dalam Miliar Rp)

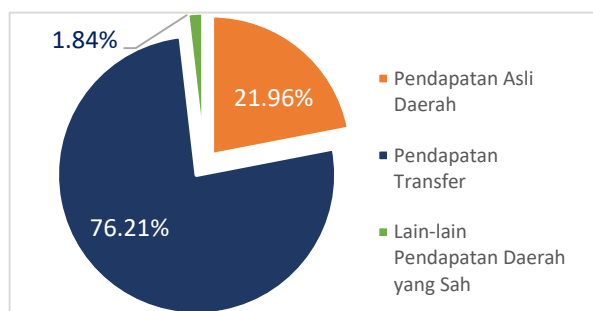
Uraian	Semester I 2020			Semester I 2021			Δ%
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
PENDAPATAN DAERAH	23.957,35	10.914,38	45,56%	23.699,27	10.063,66	42,46%	-7,79%
Pendapatan Asli Daerah	5.580,88	2.485,76	44,54%	5.689,57	2.323,72	40,84%	-6,52%
Pendapatan Transfer	17.725,70	8.312,98	46,90%	17.430,82	7.545,56	43,29%	-9,23%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	650,77	115,64	17,77%	578,88	194,37	33,58%	68,09%
BELANJA DAERAH	27.412,82	7.994,33	29,16%	26.926,33	8.414,86	31,25%	5,26%
Belanja Operasi	17.691,12	6.495,84	36,72%	18.502,09	6.928,80	37,45%	6,67%
Belanja Modal	4.530,47	749,90	16,55%	4.547,28	769,32	16,92%	2,59%
Belanja Tidak Terduga	1.303,18	220,42	16,91%	324,57	115,33	35,53%	-47,68%
Belanja Transfer	3.888,05	528,17	13,58%	3.552,39	601,42	16,93%	13,09%
SURPLUS/(DEFISIT)	-3.455,47	2.920,05		-3.227,06	1.648,79		

Sumber: GFS (Diolah)

A. Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan II 2021 secara agregat mencapai Rp10,06 triliun atau 42,46 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp23,69 triliun. Secara YoY. Pendapatan Daerah Kalimantan Selatan mengalami kontraksi sebesar 7,79 persen yang diakibatkan dampak penyebaran pandemi COVID-19 yang masih dirasakan di Provinsi Kalimantan Selatan dan penyerapan dana transfer yang masih rendah dibandingkan periode triwulan II 2020. Pendapatan transfer berkontribusi hingga Rp7,54 triliun atau 74,98 persen dari

Grafik 3.2 Pendapatan Daerah Kalimantan Selatan



Sumber: GFS (diolah)

total pendapatan daerah. Kontribusi Pendapatan dari Pemerintah Pusat yang cukup besar menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat dalam menopang pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Selatan masih sangat tinggi.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan II tahun 2021 mencapai Rp2,32 triliun atau 40,84 persen dari target sebesar Rp5,69 triliun atau mengalami kontraksi 6,52 persen secara YoY. Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar pada PAD yang mencapai 64,41 persen atau sebesar Rp1,49 triliun.

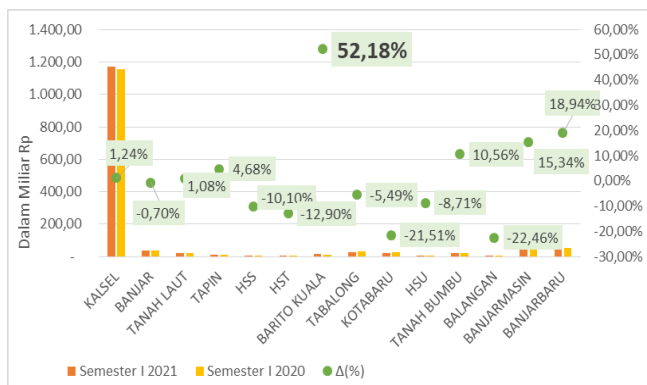
a. Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah mendominasi capaian PAD Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2021 sebesar Rp1,49 triliun. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tercatat memiliki capaian tertinggi dalam pendapatan pajak daerah

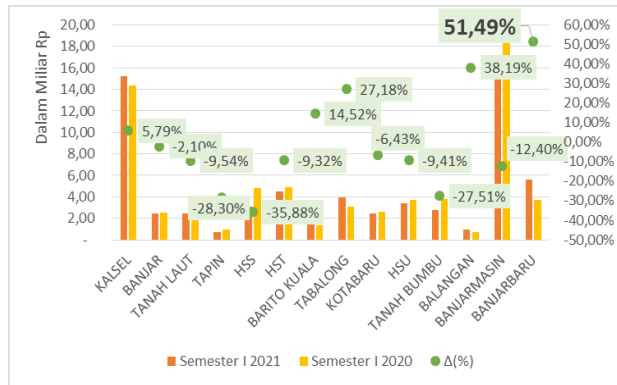
dibandingkan Pemerintah Kab/Kota di Kalimantan Selatan. Tingginya pendapatan pajak daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diperoleh dari hak pencatatan pendapatan pajak daerah yang secara khusus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, seperti: Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp349,69 miliar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp207,3 miliar, Pajak Bahan Bakar sebesar Rp495,25 miliar, Pajak Air Permukaan sebesar Rp2,57miliar dan Pajak Rokok Rp116,86 miliar.

Pendapatan Pajak Daerah mengalami pertumbuhan sebesar 2,39 persen YoY. Kab Barito Kuala memperoleh kenaikan tertinggi sebesar 52,18 persen yang dipengaruhi oleh kenaikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga 211,41 persen YoY menjadi Rp9,71 miliar.

Grafik 3.3 Realisasi Pajak Daerah Kalimantan Selatan Triwulan II 2020 dan 2021



Grafik 3.4 Realisasi Retribusi Daerah Kalimantan Selatan Triwulan II 2020 dan 2021



Sumber: GFS (diolah)

b. Retribusi Daerah

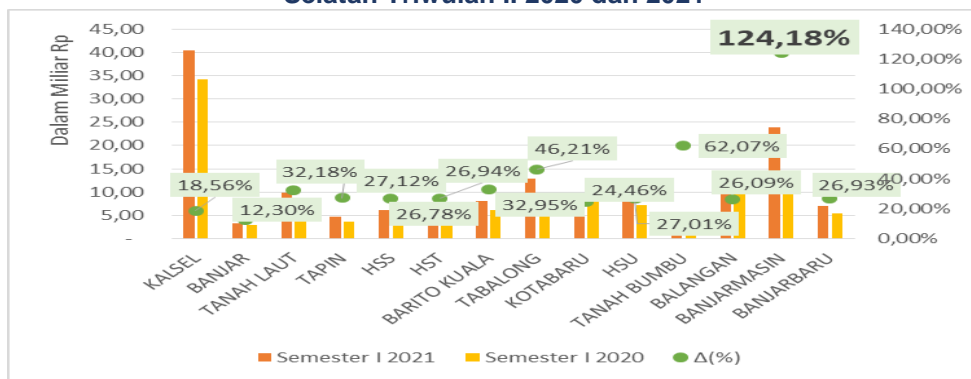
Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan triwulan II 2021 secara agregat sebesar Rp65,12 miliar atau 34,45 persen dari target sebesar Rp189,02 miliar. Kota Banjarmasin memperoleh capaian retribusi tertinggi sebesar Rp16,26 miliar yang sebagian besar diperoleh dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp7,72 miliar dan Retribusi Pelayanan Pasar Rp3,98 miliar. Posisi kota Banjarmasin sebagai kota bisnis dan perdagangan terbesar di Kalimantan Selatan menjadi alasan atas tingginya penerimaan retribusi di Kota Banjarmasin.

Secara agregat, Pendapatan Retribusi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 3,85 persen YoY disebabkan dampak pandemi yang masih dirasakan di Kalimantan Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami kontraksi penerimaan retribusi terbesar hingga -35,88 persen YoY. Hal ini disebabkan penurunan retribusi pelayanan kesehatan hingga 84,59 persen YoY menjadi Rp329,69 juta.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diperoleh dari laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, BUMN dan Swasta. Secara agregat, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan II tahun 2021 adalah sebesar Rp158,49 miliar atau 85,24 persen dari target sebesar Rp185,93 miliar atau mengalami peningkatan 35,79 persen secara YoY. Penerimaan laba BUMD pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkontribusi paling besar yaitu Rp40,45 miliar atau 25,52 persen terhadap total penerimaan.

Grafik 3.5 Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah Dipisahkan Kalimantan Selatan Triwulan II 2020 dan 2021



Sumber: GFS (diolah)

d. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

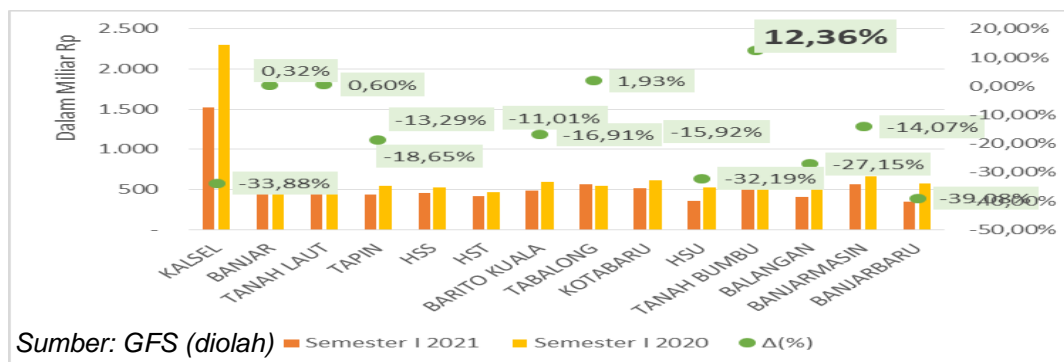
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah secara agregat sampai dengan triwulan II tahun 2021 adalah sebesar Rp603,47 miliar atau 33,48 persen terhadap target sebesar Rp1,80 triliun. Pendapatan BLUD memberikan kontribusi tertinggi sebesar Rp443,45 miliar atau 73,48 persen terhadap capaian penerimaan ini. Pendapatan BLUD Provinsi Kalimantan Selatan merupakan yang tertinggi tertinggi dengan nilai pendapatan sebesar Rp201,74 miliar yang diperoleh dari 3 RS BLUD milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu RSUD Ulin, RSUD dr H. M. Ansari Saleh, dan RSJ Sambang Lihum.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan II tahun 2021 diperoleh dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp7,54 triliun dan Transfer Antar Pemerintah Daerah Rp2,65 miliar. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagian besar diperoleh dari dana perimbangan sebesar Rp7,16 miliar. Realisasi Dana Perimbangan mengalami kontraksi 9,58 persen secara YoY pada triwulan II tahun

2021. Rendahnya serapan dana transfer pemerintah salah satunya diakibatkan keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa pada DAK Fisik di awal tahun 2021.

Grafik 3.6 Realisasi Pendapatan Transfer Kalimantan Selatan Triwulan II 2020 dan 2021



Selain itu, terbatasnya ketersediaan barang/jasa di *e-catalog* juga menjadi penyebab lambatnya serapan DAK Fisik.

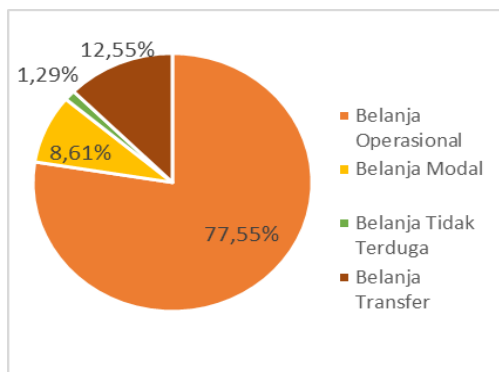
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah bersumber dari pendapatan hibah, pendapatan dari dana darurat dan pendapatan lainnya. Secara agregat, Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sampai dengan triwulan II tahun 2021 adalah sebesar Rp194,37 miliar atau 33,58 persen dari target sebesar Rp578,88 miliar. Pendapatan ini terdiri dari hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp131,44 miliar (67,62 persen), Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp60,47 miliar (31,11 persen) dan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan sebesar Rp9,19 juta (0,05 persen).

B. Belanja Daerah

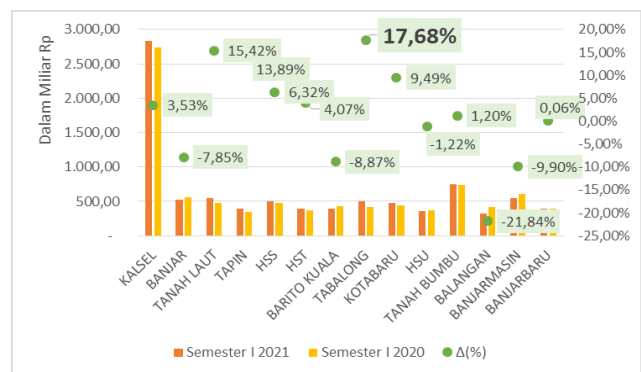
Alokasi belanja daerah termasuk transfer ke pemda secara agregat Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp26,93 triliun atau menurun dari alokasi semula yang ditetapkan sebesar Rp27,41 triliun. Hal tersebut sebagai bentuk respons dalam penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan ekonomi daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Grafik 3.7 Komposisi Belanja Daerah Kalimantan Selatan Triwulan II 2021



Sumber: GFS (diolah)

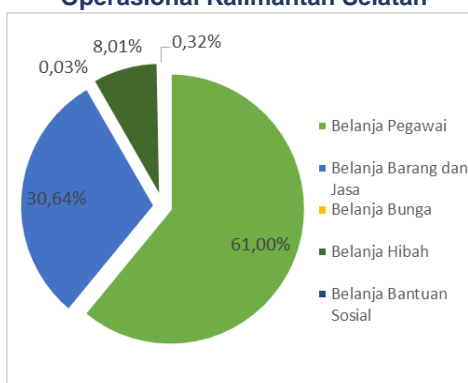
Grafik 3.8 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II 2021



1. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi

Berdasarkan klasifikasi ekonomi, Realisasi belanja daerah secara agregat di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp8,41 triliun atau 31,25 persen terhadap pagu. Realisasi belanja daerah tumbuh sebesar 5,26 persen YoY. Belanja Operasional mendominasi 82,34 persen capaian belanja daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Grafik 3.9 Komposisi Belanja Operasional Kalimantan Selatan



Sumber: GFS (diolah)

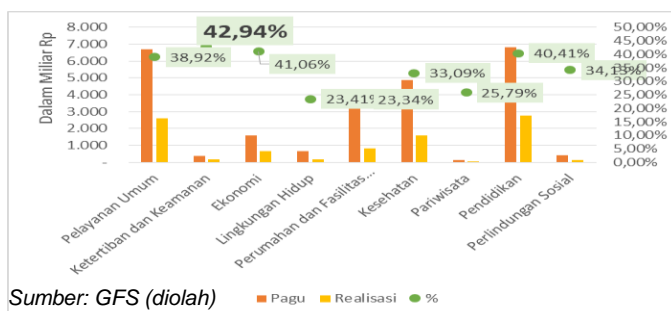
Belanja Pegawai merupakan jenis belanja operasional tertinggi sebesar 61 persen atau Rp4,23 triliun. Sebagian besar Belanja Pegawai diperoleh dari Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp2,69 triliun (63,56 persen). Sementara itu, belanja barang memberikan kontribusi sebesar 30,64 persen atau Rp2,12 triliun. Sebagian besar Belanja Barang dan Jasa diperoleh dari Belanja Jasa Kantor Rp810,86miliar (38,19 persen).

Belanja Modal memberikan kontribusi sebesar 8,61 persen terhadap belanja daerah Provinsi Kalimantan Selatan atau sebesar Rp769,32 miliar. Belanja modal mengalami pertumbuhan 2,59 persen YoY yang diakibatkan dimulainya kembali proyek belanja modal/infrastruktur di daerah. Sebagian besar belanja modal diperoleh dari belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp496,20 miliar (64,50 persen).

Rasio PAD terhadap realisasi Belanja Daerah atas beban APBD Agregat Kalimantan Selatan mencapai 27,61 persen. Hal ini menunjukkan bahwa untuk membiayai keperluan belanja daerahnya, peran Pemerintah Pusat melalui dana transfer masih sangat mendominasi APBD Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Fungsi

Grafik 3.10 Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Fungsi



Sumber: GFS (diolah)

Berdasarkan klasifikasi fungsi, serapan belanja fungsi ketertiban dan keamanan merupakan yang terbesar hingga 42,94 persen. Belanja fungsi ini sebagian besar diperoleh dari urusan ketentraman dan ketertiban

umum serta perlindungan masyarakat. Sementara itu, Fungsi pendidikan memperoleh capaian realisasi tertinggi dari semua jenis fungsi yaitu sebesar Rp2,76 triliun atau

30,86 persen dari total belanja daerah. Besarnya proporsi realisasi belanja fungsi pendidikan telah memenuhi ketentuan minimal 20 persen dari total belanja daerah sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1).

3. Dukungan Belanja Daerah melalui APBD untuk PC-PEN

Peningkatan pagu belanja Daerah diantaranya dilakukan melalui refocusing anggaran dan kegiatan untuk belanja PC-PEN, sejalan kebijakan di level Pusat.

Tabel 3.2 Dukungan Pemda melalui APBD untuk PC-PEN

DAERAH	Penanganan Covid-19		Dukungan Vaksinasi		Dukungan pada Keluarahan dlm rangka Penganan Covid-19		Insentif Nakes Daerah		Belanja Kesehatan lainnya dan Kegiatan Prioritas		Total			% pemenuhan earmarked dalam DTU (DAU dan	Ket
	Anggr	Real	Anggr	Real	Anggr	Real	Anggr	Real	Anggr	Real	Anggr	Real	%		
Provinsi Kalsel	37,96	27,96	1,16	1,16	-	-	23,42	23,42	95,25	22,34	157,79	74,87	47,45%	14,43%	memenuhi
Kab Banjar	2,00	1,56	18,22	-	8,72	1,94	21,89	11,52	3,40	0,12	54,22	15,14	27,92%	8,04%	memenuhi
Kab Barito Kuala	4,53	0,66	24,44	-	0,03	-	0,12	-	13,56	-	42,68	0,66	1,55%	8,11%	memenuhi
Kab Hulu Sungai Selatan	2,94	0,04	7,91	0,12	1,15	-	20,88	6,48	5,26	-	38,14	6,65	17,44%	8,03%	memenuhi
Kab Hulu Sungai Tengah	2,79	-	3,38	0,17	1,42	0,26	-	-	41,08	27,42	48,68	27,85	57,21%	10,18%	memenuhi
Kab Hulu Sungai Utara	25,14	0,96	8,22	-	1,46	-	4,43	-	-	-	39,25	0,96	2,45%	8,77%	memenuhi
Kab Kota baru	-	-	1,44	-	-	-	10,59	-	38,14	6,94	50,17	6,94	13,83%	8,61%	memenuhi
Kab Tabalong	2,99	1,40	11,34	0,50	0,65	-	21,13	2,20	-	-	36,11	4,11	11,38%	8,00%	memenuhi
Kab Tanah Laut	7,94	2,12	4,03	0,15	1,25	0,09	3,89	1,58	23,30	0,86	40,41	4,80	11,88%	8,18%	memenuhi
Kab Tapin	26,99	6,91	4,21	-	9,00	1,15	7,18	-	10,32	0,22	57,70	8,28	14,35%	13,85%	memenuhi
Kota Banjarbaru	7,72	3,94	4,35	1,22	-	-	27,29	4,42	-	-	39,36	9,59	24,36%	8,06%	memenuhi
Kota Banjarmasin	6,46	0,19	-	-	-	-	5,76	1,84	56,25	27,09	68,47	29,12	42,53%	10,38%	memenuhi
Kab Balangan	0,33	0,15	4,08	0,78	-	-	18,22	1,17	5,10	-	27,72	2,10	7,58%	8,00%	memenuhi
Kab Tanah Bumbu	8,63	0,94	17,51	-	0,25	0,03	14,73	0,30	9,30	9,30	50,42	10,56	20,94%	11,77%	memenuhi
TOTAL	136,42	46,83	110,29	4,10	23,93	3,47	179,53	52,93	300,96	94,29	751,12	201,63	26,84%		

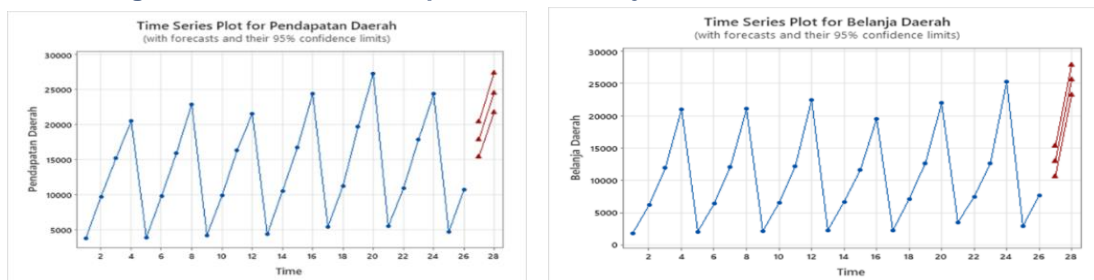
Sumber: Simtrada (diolah)

Sampai dengan akhir Triwulan II 2021, *earmarking* 8 persen atas alokasi Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) yang ditujukan untuk PC-PEN telah dipenuhi oleh seluruh Pemda di wilayah Kalimantan Selatan.

C. Prognosis Realisasi APBD

Prognosis realisasi APBD sampai dengan akhir tahun 2020 dilakukan dengan analisis deret waktu dengan pemodelan ARIMA pada pendapatan dan belanja daerah. Prognosis tersebut berdasarkan data realisasi pendapatan dan belanja APBD agregat Provinsi Kalimantan Selatan selama 6 tahun terakhir.

Grafik 3.11 Prognosis Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan



Sumber: GFS (diolah)

Pendapatan Daerah Kalimantan Selatan diperkirakan akan mencapai Rp23,69 triliun atau 99,97 persen dari target APBD pada akhir tahun 2021. Namun dengan

adanya kenaikan kasus COVID-19 yang terjadi di berbagai daerah akibat penyebaran varian delta mengharuskan Pemerintah mengambil kebijakan PPKM selama bulan Juli-Agustus 2021. Berdasarkan kondisi tersebut maka pendapatan daerah diperkirakan akan mencapai Rp21,78 triliun atau 91,90 persen dari target pada kondisi terburuk.

Belanja Daerah Kalimantan Selatan diperkirakan mencapai Rp25,61 triliun atau 95,10 persen dari pagu sebesar Rp26,93 triliun pada akhir tahun 2021. Pada kondisi *extraordinary*, belanja daerah diperkirakan akan mencapai Rp27,95 triliun atau sebesar 103,82 persen dari pagu. Perkiraan belanja hingga melampaui 100 persen tersebut dapat terjadi sebagai bentuk respons Pemda terhadap dampak PPKM yang terjadi di bulan Juli s.d. Agustus 2021.

Tabel 3.3 Prognosis Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Selatan
(Dalam Miliar Rp)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d Triwulan I		Realisasi s.d Triwulan II		Perkiraan s.d Triwulan III		Perkiraan s.d Triwulan IV	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pendapatan Daerah	23.699,27	4.757,91	20,08%	10.063,66	42,46%	17.928,40	75,65%	23.692,31	99,97%
Belanja Daerah	26.926,33	2.906,16	10,79%	8.414,86	31,25%	16.957,80	62,97%	25.606,30	95,1%
Surplus /Defisit	(3.227,06)	1.851,75		1.648,79		970,60		(1.913,99)	

Sumber: GFS dan Aplikasi Minitab (diolah)

BAB IV

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN



Pendapatan Negara Konsolidasian Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 adalah sebesar Rp6,92 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Perpajakan sebesar Rp5,35 triliun, PNBPNP Rp1,37 triliun dan hibah Rp194,37 miliar.

Realisasi Belanja Konsolidasian pada Triwulan II Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp457,66 miliar atau tumbuh 3,64 persen YoY.

BAB IV

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN

POIN UTAMA

- *Peningkatan belanja pemerintah menyumbang peningkatan PDRB Triwulan II Tahun 2021 sebesar Rp47,60 triliun atau naik Rp3,74 triliun YoY.*
- *Di luar belanja transfer, perbandingan realisasi belanja Pemerintah Pusat dan Pemda Triwulan II Tahun 2021 adalah sebesar Rp3,72 triliun atau 32,23 persen dan Rp7,81 triliun atau 67,77 persen terhadap total belanja Pemerintah konsolidasian.*

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dihasilkan dari penggabungan/konsolidasi antara Laporan Anggaran Pemerintah Pusat dan Laporan Anggaran Pemerintah Daerah. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian, tercatat bahwa nilai Pendapatan Negara Konsolidasian sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp6,92 triliun atau tumbuh sebesar 1,71 persen YoY. Sementara itu, Belanja Negara Konsolidasian tercatat sebesar Rp13,03 triliun dan tumbuh sebesar 3,64 persen YoY.

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Provinsi Kalimantan Selatan s.d. Triwulan II 2021 (Dalam Miliar Rp)

Uraian	2021			2020	Δ(%)
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Konsolidasi	
Pendapatan Negara	4.401,25	2.521,08	6.922,33	6.805,77	1,71%
Pendapatan Perpajakan	3.857,51	1.496,65	5.354,15	5.009,05	6,89%
PNBP	543,74	827,08	1.370,82	1.638,78	-16,35%
Hibah	-	194,37	194,37	115,64	68,09%
Transfer *)	-	2,99	2,99	42,30	-92,94%
Belanja Negara	4.613,21	8.414,86	13.028,07	12.570,41	3,64%
Belanja Pemerintah	3.716,61	7.813,44	11.530,05	10.411,99	10,74%
Transfer *)	896,60	601,42	1.498,02	2.158,42	-30,60%
Surplus/(Defisit)	-211,96	-5.893,78	-6.105,74	-5.764,64	5,92%
Pembiayaan	-	1.026,60	1.026,60	1.665,93	-38,38%
Penerimaan Pembiayaan	-	1.063,57	1.063,57	1.707,04	-37,70%
Pengeluaran Pembiayaan	-	36,96	36,96	41,11	-10,08%
SiLPA	-211,96	-4.867,18	-5.079,14	-4.098,70	23,92%

*) Seluruh Pengeluaran Transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah
(Sumber: LKPK GFS)

B. Pendapatan Konsolidasian

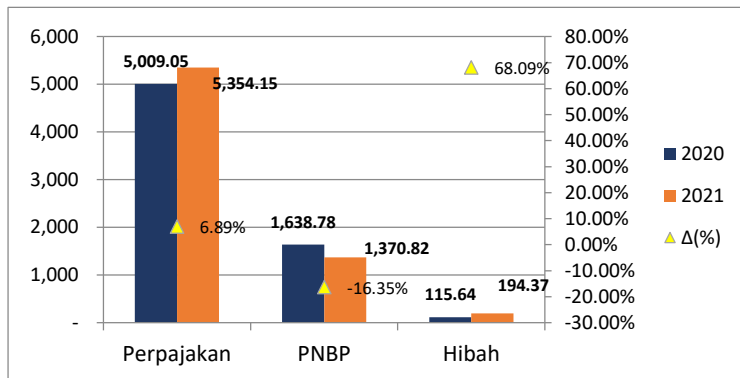
Pendapatan Negara Konsolidasian Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 adalah sebesar Rp6,92 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Perpajakan sebesar Rp5,35 triliun, PNBP Rp1,37 triliun dan hibah Rp194,37 miliar.

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Pendapatan Negara Konsolidasian sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan 1,71 persen YoY.

Peningkatan tersebut menunjukkan perbaikan aktivitas perekonomian masyarakat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan perpajakan memberikan kontribusi terbesar pada pendapatan konsolidasi sebesar Rp5,35 triliun atau 77,35 persen. Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penerimaan di Triwulan II Tahun 2021 mengalami kontraksi sebesar 16,35 persen YoY. Kontraksi tersebut terjadi baik dari PNBP

Grafik 4.1 Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Kalsel s.d. TW II 2021 (Dalam Miliar Rp)



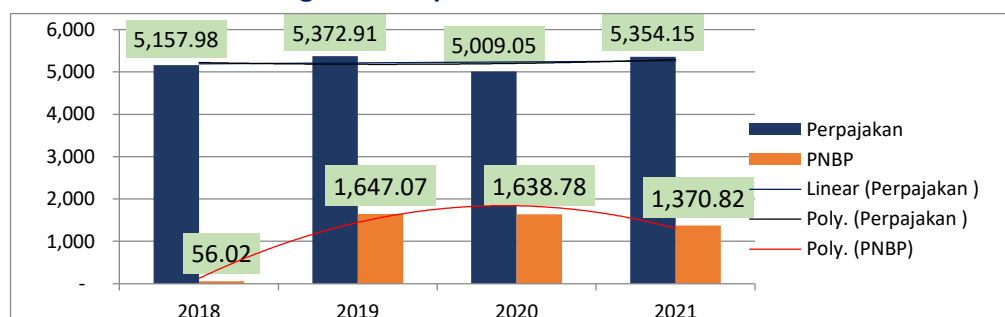
Sumber: LKPK GFS dan BPS (diolah)

agregat Provinsi Kalimantan Selatan.

1. Analisis Perubahan

Perkembangan pendapatan konsolidasian triwulan II dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami pertumbuhan positif meskipun pada tahun 2020 menurun karena dampak pandemi COVID-19. Pendapatan Perpajakan Konsolidasi dan Hibah tumbuh positif masing-masing sebesar 6,89 persen dan 68,09 persen YoY. Pendapatan Hibah sebagian besar diperoleh dari Hibah Pemerintah Pusat Rp131,44 miliar dan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp60,47 miliar.

Grafik 4.2 Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Kalsel s.d. TW II 2021



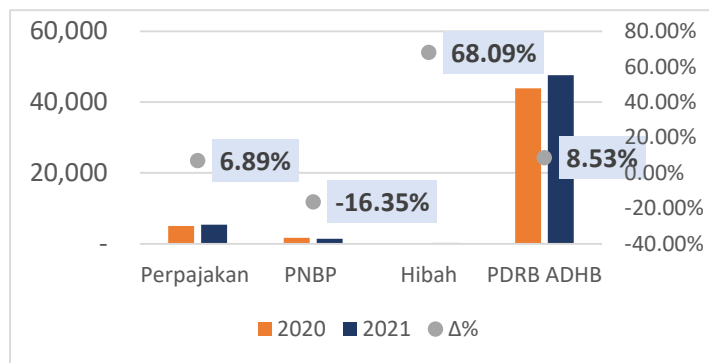
Sumber: LKPK GFS dan BPS (diolah)

2. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2021 mengalami pertumbuhan 4,40 persen YoY dengan PDRB ADHB sebesar Rp43,86 triliun. Dari sisi lapangan usaha, jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami pertumbuhan tertinggi 8,64 persen YoY. Tingginya peningkatan sektor usaha ini sejalan dengan peningkatan kasus COVID-19 di sejumlah

daerah di Indonesia akibat penyebaran varian delta. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan

Grafik 4.3 Realisasi Pendapatan Konsolidasian dengan PDRB Kalsel (Dalam Miliar Rp)



Sumber: LKPK GFS dan BPS Kalsel (diolah)

Selatan mengalami penguatan di kuartal II-2021 didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat melalui kinerja Pendapatan Negara Konsolidasian, khususnya perpajakan hingga 6,89 persen YoY. BPS mencatat, berdasarkan hasil Survei Perdagangan Eceran (SPE) BI di Kota Banjarmasin, pada periode triwulan II 2021 ini

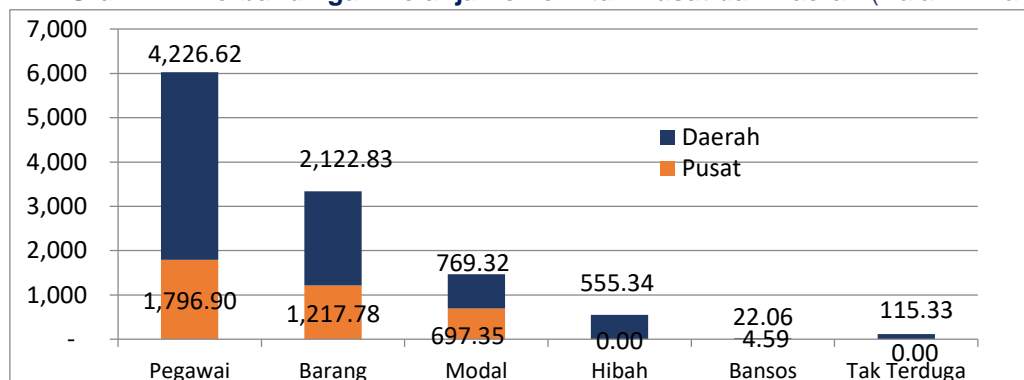
menunjukkan peningkatan sebesar 46,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di samping itu, penyaluran stimulus fiskal dan percepatan vaksinasi merupakan kunci utama akselerasi pemulihan ekonomi di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Belanja Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Secara umum, porsi belanja Pemerintah Daerah terhadap belanja konsolidasian lebih besar dibandingkan dengan belanja Pemerintah Pusat. Di luar alokasi belanja transfer, total realisasi belanja Pemerintah Pusat Triwulan II Tahun 2021 adalah sebesar Rp3,72 triliun atau 32,23 persen terhadap total belanja Pemerintah konsolidasian dan total realisasi belanja daerah sebesar Rp7,81 triliun atau 67,77 persen terhadap total belanja Pemerintah konsolidasian.

Grafik 4.4 Perbandingan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah (Dalam Miliar Rp)



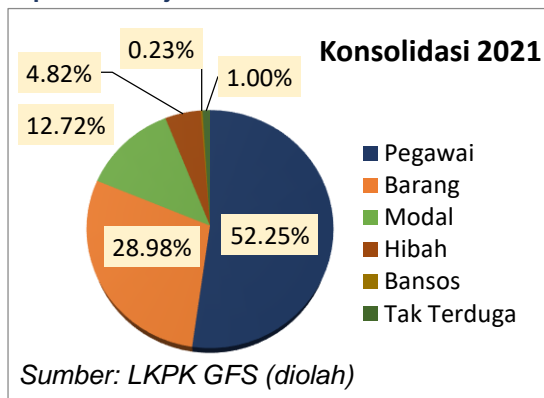
Sumber: LKPK GFS (diolah)

Belanja Pegawai memberikan kontribusi tertinggi pada belanja Pemerintah Konsolidasian sebesar Rp6,02 triliun. Belanja pegawai Pemerintah Daerah memberikan kontribusi Rp4,23 triliun atau 70,17 persen, sedangkan belanja pegawai Pemerintah Pusat sebesar Rp1,79 triliun atau 29,83 persen.

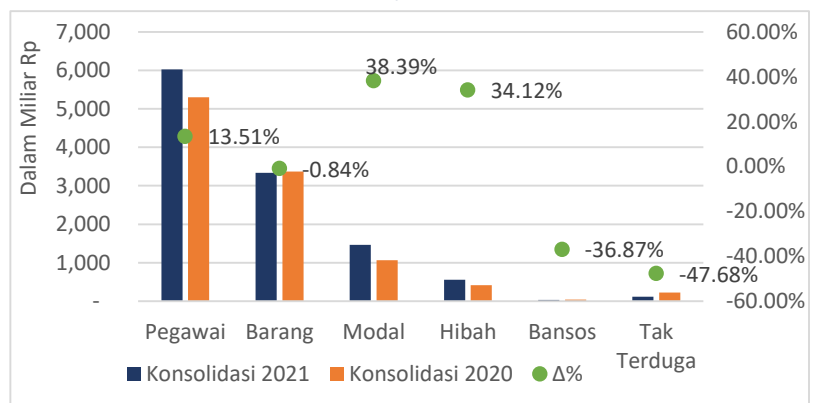
2. Analisis Perubahan

Realisasi Belanja Konsolidasian pada Triwulan II Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp457,66 miliar atau tumbuh 3,64 persen YoY. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh meningkatnya belanja pemerintah pusat di seluruh jenis belanja. Peningkatan belanja terbesar diperoleh dari jenis belanja modal sebesar Rp406,84 miliar atau 38,39 persen YoY. Belanja modal salah satunya diwujudkan dalam bentuk belanja infrastruktur yang sempat tertunda dilakukan pada tahun 2020. Pembangunan beberapa proyek infrastruktur baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan upaya Pemulihan Ekonomi yang berkelanjutan.

Grafik 4.5
Proporsi Belanja Konsolidasian Triwulan II 2020



Grafik 4.6
Perubahan Jenis Belanja Daerah (Dalam Miliar Rp)



3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Indikator Ekonomi Regional

Strategi Kebijakan fiskal pemerintah pada Triwulan II Tahun 2021 diarahkan untuk menjaga dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, reformasi APBN, penguatan reformasi struktural dan akselerasi prioritas pembangunan nasional. Pemulihan Ekonomi Nasional dapat terwujud dengan percepatan vaksinasi dan percepatan penyaluran stimulus fiskal. Munculnya varian delta di beberapa Negara termasuk Indonesia mengakibatkan Pemerintah mengambil langkah PPKM di berbagai wilayah. Potensi pelemahan ekonomi perlu diwaspadai terjadi pada kuartal ketiga.

Belanja pemerintah konsolidasian sampai dengan triwulan II 2021 terealisasi sebesar Rp11,53 triliun, meningkat sebesar Rp1,12 triliun atau 10,74 persen YoY. Peningkatan kinerja belanja pemerintah mendorong peningkatan capaian PDRB Triwulan II Tahun 2021 sebesar Rp47,60 triliun atau naik Rp3,74 triliun YoY. Di sisi lain, dampak pelemahan ekonomi akibat pandemi COVID-19 masih terlihat. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2021 sebesar 4,33 persen atau meningkat 0,53 persen dibandingkan kondisi Februari 2020. Pemerintah telah menyalurkan stimulus berupa kartu Prakerja sebesar Rp217,02 miliar kepada 61.133 Penerima Manfaat bagi penduduk usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19.

Tabel 4.2 Hubungan Belanja Pemerintah dengan Indikator Ekonomi Regional

Uraian	Tw II 2020	Tw II 2021	Perubahan
Belanja Pemerintah	Rp10,41 triliun	Rp11,53 triliun	Rp1,12 triliun
PDRB ADHB	Rp43,86 triliun	Rp47,60 triliun	Rp3,74 triliun
Pertumbuhan Ekonomi (YoY)	-2,86%	4,40%	
TPT (kondisi Feb)	3,80%	4,33%	0,53%
Kemiskinan (kondisi Mar)	4,38%	4,83%	0,45%

Sumber: LKPK GFS, BPS (diolah)

D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto

Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan (sebagaimana tercantum pada Tabel LO GFS lampiran 5) memberikan kontribusi sebesar 19,21 persen terhadap PDRB. Peran stimulus fiskal Pemerintah sangat diperlukan dalam mewujudkan pemulihan ekonomi Nasional. Sebagai implementasinya, Pemerintah menambah alokasi penanganan COVID-19 dan PEN untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial masing-masing menjadi Rp214,95 triliun dan Rp187,84 triliun.

Investasi pemerintah berkontribusi 3,00 persen terhadap PDRB atau meningkat 0,62 persen YoY. Peningkatan belanja Infrastruktur Pemerintah pada triwulan II 2021 ini mendorong peningkatan PDRB di Kalimantan Selatan. Pembangunan infrastruktur menjadi sarana pemerataan pembangunan, dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi di seluruh wilayah di Kalimantan Selatan.

Dalam hal ini, penghitungan kontribusi pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB Kalimantan Selatan belum termasuk dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) atas beban Pemerintah Pusat (APBN) yang disalurkan dan penerima manfaatnya di wilayah Kalimantan Selatan. Adapun dana PC-PEN disalurkan di Kalimantan Selatan s.d. 28 Juni 2021 meliputi: 1) Program Keluarga Harapan Rp127miliar kepada 12.066 KPM; 2) BPNT Rp178,26 miliar kepada 133.735 KPM; 3) Bansos Tunai Rp131,29 miliar kepada 106.588 KPM; 4) Kartu Prakerja senilai Rp217,02 miliar kepada 61.133 orang; 5) BLT Dana Desa Rp156,14 miliar kepada 520.481 KPM; 6) subsidi kuota internet senilai Rp11,31 miliar kepada 388.531 orang siswa/mahasiswa/guru/dosen; 7) diskon listrik senilai Rp118,22 miliar kepada 721.444 pelanggan; 8) klaim biaya RS untuk penanganan Covid-19 Rp195,05 miliar kepada 2.854 pasien; 9) BPUM Rp150,402 miliar kepada 125.335 PUM; 10) program padat karya pada Kementerian PUPR Rp201,56 miliar kepada 10.557 pekerja; 11) program padat karya pada Kementerian Perhubungan Rp15,47 miliar kepada 270 pekerja; 12) program padat karya pada Kementerian Pertanian Rp14,85 miliar kepada 4.552 pekerja; 13) program padat karya pada Kementerian (*food estate*) Rp0,49 miliar kepada 151 pekerja.

BAB V

BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH



Berita Fiskal Terpilih :

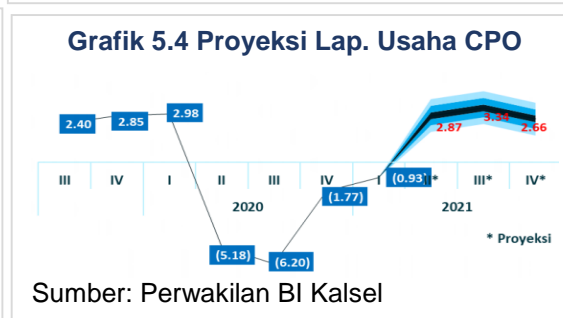
- **Pemetaan Sektor Unggulan Kalimantan Selatan**
- **Sektor Unggulan Kalimantan Selatan, Kebun Sawit Serap Lebih Dari 70 ribu Pekerja**

BAB V

ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

PEMETAAN SEKTOR UNGGULAN KALIMANTAN SELATAN

Berdasarkan share terhadap PDRB, sektor pertanian kehutanan dan perikanan merupakan sektor unggulan dan potensial terbesar kedua bagi perekonomian Kalimantan Selatan, dengan share 14,36 persen terhadap PDRB. Dalam sektor pertanian kehutanan dan perikanan, share terbesar berasal dari hasil perkebunan kelapa sawit (*Crude Palm Oil/CPO*).



Berdasarkan data pada Bank Indonesia perwakilan Kalimantan Selatan dinyatakan bahwa proyeksi lapangan usaha pengolahan CPO diperkirakan tumbuh positif ditopang oleh jumlah produksi, harga, dan ekspor CPO. Dalam hal ekspor CPO, diperlukan strategi penguatan ekspor melalui pemeliharaan pasar ekspor dan penguatan produk ekspor.

Sektor Unggulan Kalimantan Selatan, Kebun Sawit Serap Lebih dari 70 ribu Pekerja (sumber: <https://www.wartaekonomi.co.id/read348970/sektor-unggulan-kalimantan-selatan-kebun-sawit-serap-lebih-dari-70-ribu-pekerja>, 5 Juli 2021)

Perkebunan merupakan salah satu subsektor unggulan pertanian yang mampu bertahan di tengah pandemi, didukung dengan komoditas kelapa sawit sebagai salah satu penopang perekonomian. Luasan lahan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan mencapai 426.445ha, yang terdiri dari 313.545ha milik perusahaan swasta dan 6.489ha milik perusahaan negara, dan 106.441ha merupakan perkebunan milik rakyat. Dari seluruh luasan tersebut dapat menghasilkan total produksi minyak sawit mentah (CPO) hingga 1.130.745 ton. Pj. Gubernur Kalimantan Selatan menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja diperkebunan sawit sebanyak 71.066 orang. Hingga saat ini, Kalimantan Selatan baru memiliki 2 (dua) industri pengolahan sawit menjadi minyak goreng.



LAMPIRAN

LAMPIRAN DATA

1. Tabel *i-account* APBN Provinsi Kalimantan Selatan Semester I 2019-2021 (Dalam Miliar Rp)

URAIAN	Semester I 2021			Semester I 2020			Semester I 2019		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
A. Pendapatan dan Hibah	10.087,46	4.401,25	43,63%	13.038,29	4.162,08	31,92%	10.938,43	4.839,20	44,24%
I. Penerimaan Dalam Negeri	10.087,46	4.401,25	43,63%	13.038,29	4.162,08	31,92%	10.938,43	4.839,20	44,24%
1. Penerimaan Perpajakan	9.214,42	3.857,51	41,86%	11.999,46	3.547,28	29,56%	10.039,04	4.269,48	42,53%
a. Pajak Dalam Negeri	9.180,50	3.461,18	37,70%	11.894,58	3.510,01	29,51%	9.985,18	4.169,33	41,76%
i. Pajak Penghasilan	5.176,62	1.788,48	34,55%	7.838,71	2.317,16	29,56%	6.041,31	3.030,96	50,17%
ii. Pajak Pertambahan Nilai	3.517,59	1.549,17	44,04%	3.518,23	1.119,82	31,83%	3.425,81	1.056,54	30,84%
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	344,00	51,30	14,91%	451,67	39,35	8,71%	418,26	46,85	11,20%
v. Cukai	0,66	0,24	37,02%	0,40	0,84	209,72%	0,20	0,15	75,27%
vi. Pajak Lainnya	141,63	71,99	50,83%	85,58	32,84	38,37%	99,60	34,82	34,95%
b. Pajak Perdagangan Internasional	33,91	396,33	1168,60%	104,87	37,27	35,54%	53,86	100,16	185,97%
i. Bea Masuk	20,03	26,13	130,44%	92,00	28,67	31,16%	38,64	92,90	240,44%
ii. Bea Keluar	13,88	370,19	2667,17%	12,87	8,61	66,89%	15,22	7,26	47,68%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	873,04	543,74	62,28%	1.038,83	614,79	59,18%	899,39	569,71	63,34%
c. PNBP Lainnya	837,12	513,17	61,30%	1.000,02	584,82	58,48%	856,93	552,17	64,44%
d. Pendapatan BLU	35,92	30,57	85,10%	38,81	29,98	77,24%	42,46	17,54	41,31%
B. Belanja Negara	25.085,32	12.155,79	48,46%	25.036,26	12.846,76	51,31%	29.276,53	12.976,53	44,32%
I. Belanja Pemerintah Pusat	8.815,33	3.716,61	42,16%	7.938,26	2.945,83	37,11%	9.740,12	3.536,37	36,31%
1. Belanja Pegawai	3.548,35	1.796,90	50,64%	3.638,97	1.632,36	44,86%	3.239,68	1.626,34	50,20%
2. Belanja Barang	3.150,08	1.217,78	38,66%	2.916,22	999,99	34,29%	4.398,05	1.469,74	33,42%
3. Belanja Modal	2.107,01	697,35	33,10%	1.371,23	309,94	22,60%	2.089,12	436,91	20,91%
7. Bantuan Sosial	9,89	4,59	46,38%	11,84	3,55	29,99%	13,27	3,37	25,38%
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	16.269,99	8.439,18	51,87%	17.098,00	9.900,93	57,91%	19.536,40	9.440,16	48,32%
A. Transfer ke Daerah	14.744,22	7.799,32	52,90%	15.585,06	8.803,85	56,49%	18.030,06	8.539,82	47,36%

a. Dana Perimbangan	14.298,39	7.576,40	52,99%	15.061,31	8.455,29	56,14%	17.716,84	8.383,21	47,32%
i. Dana Transfer Umum	10.505,48	6.049,53	57,58%	11.968,76	7.040,85	58,83%	13.752,98	7.149,79	51,99%
- Dana Bagi Hasil	3.019,31	1.987,83	65,84%	4.340,49	2.448,05	56,40%	5.374,11	2.266,58	42,18%
- Dana Alokasi Umum	7.486,17	4.061,70	54,26%	7.628,27	4.592,80	60,21%	8.378,87	4.883,21	58,28%
ii. Dana Transfer Khusus	3.792,91	1.526,87	40,26%	3.092,55	1.414,43	45,74%	3.963,86	1.233,42	31,12%
- DAK Fisik	1.446,49	169,46	11,72%	850,95	154,39	18,14%	1.592,03	204,08	12,82%
- DAK Non Fisik	2.346,43	1.357,42	57,85%	2.241,60	1.260,04	56,21%	2.371,83	1.029,34	43,40%
b. Dana Insentif Daerah	445,83	222,92	50,00%	523,76	348,57	66,55%	313,22	156,61	50,00%
B. Dana Desa	1.525,77	639,86	41,94%	1.512,94	1.097,07	72,51%	1.506,34	900,34	59,77%
C. Keseimbangan Primer	-	-		-	-		-	-	
D. Surplus/Defisit Anggaran	- 14.997,86	-7.754,54		-11.997,97	-8.684,68	72,38%	- 18.338,10	-8.137,33	44,37%

2. Belanja APBN Per Fungsi Provinsi Kalimantan Selatan Semester I 2021

NMFUNGSI	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
'PELAYANAN UMUM	4.179.396.091.000	1.485.539.969.566	35,54%
'PERTAHANAN	641.560.697.000	319.704.357.085	49,83%
'KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1.672.547.823.000	833.333.446.707	49,82%
'EKONOMI	2.431.969.392.000	847.828.012.466	34,86%
'LINGKUNGAN HIDUP	376.913.889.000	138.729.866.780	36,81%
'PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	586.097.395.000	220.164.284.727	37,56%
'KESEHATAN	299.584.835.000	94.300.209.413	31,48%
'AGAMA	215.386.225.000	99.679.812.363	46,28%
'PENDIDIKAN	2.325.624.197.000	932.847.580.258	40,11%
'PERLINDUNGAN SOSIAL	41.757.496.000	12.330.747.839	29,53%

3. Tabel APBD Agregat Provinsi Kalimantan Selatan Periode Semester I 2020 dan 2021 (Miliar Rp)

Uraian	Semester I 2021			Semester I 2020			Δ%
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
PENDAPATAN DAERAH	23.699,27	10.063,66	42,46%	23.957,35	10.914,38	45,56%	-7,79%
Pendapatan Asli Daerah	5.689,57	2.323,72	40,84%	5.580,88	2.485,76	44,54%	-6,52%
Pajak Daerah	3.512,22	1.496,65	42,61%	3.745,09	1.461,77	39,03%	2,39%
Retribusi Daerah	189,02	65,12	34,45%	166,89	67,73	40,58%	-3,85%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	185,93	158,49	85,24%	174,00	116,72	67,08%	35,79%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.802,40	603,47	33,48%	1.494,91	839,54	56,16%	-28,12%
Pendapatan Transfer	17.430,82	7.545,56	43,29%	17.725,70	8.312,98	46,90%	-9,23%
Transfer Pemerintah Pusat	16.106,92	7.542,91	46,83%	16.696,11	8.312,98	49,79%	-9,26%
Dana Perimbangan	14.238,29	7.161,07	50,29%	15.319,81	7.919,96	51,70%	-9,58%
Dana Insentif Daerah	445,83	223,08	50,04%	49,54	348,57	703,62%	-36,00%
Dana Otonomi khusus	-	-		-	-		
Dana Penyesuaian	-	-		1.326,76	44,45	3,35%	100,00%
Dana Keistimewaan	-	-		-	-		
Dana Desa	1.422,80	158,76	11,16%	-	-		
Transfer Antar Daerah	1.323,90	2,65	0,20%	1.029,59	-	0,00%	
Pendapatan Bagi Hasil	1.322,70	-	0,00%	1.029,59	-	0,00%	
Bantuan Keuangan	1,20	2,65	220,83%	-	-		
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	578,88	194,37	33,58%	650,77	115,64	17,77%	68,09%
Hibah	229,66	194,37	84,63%	650,77	115,64	17,77%	68,09%
Dana Darurat	-	-		-	-		
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	349,22	-	0,00%	-	-		
BELANJA DAERAH	26.926,33	8.414,86	31,25%	27.412,82	7.994,33	29,16%	5,26%
Belanja Operasi	18.502,09	6.928,80	37,45%	17.691,12	6.495,84	36,72%	6,67%
Belanja Pegawai	9.468,42	4.226,62	44,64%	9.959,03	3.674,07	36,89%	15,04%
Belanja Barang dan Jasa	7.699,33	2.122,83	27,57%	6.176,19	2.368,86	38,35%	-10,39%
Belanja Bunga	25,05	1,95	7,77%	11,66	0,19	1,63%	923,36%

Belanja Subsidi	-	-		-	-		
Belanja Hibah	1.169,34	555,34	47,49%	1.438,57	414,07	28,78%	34,12%
Belanja Bantuan Sosial	139,96	22,06	15,76%	105,68	38,65	36,58%	-42,94%
Belanja Modal	4.547,28	769,32	16,92%	4.530,47	749,90	16,55%	2,59%
Belanja Modal	4.547,28	769,32	16,92%	4.530,47	749,90	16,55%	2,59%
Belanja Tidak Terduga	324,57	115,33	35,53%	1.303,18	220,42	16,91%	-47,68%
Belanja Tidak Terduga	324,57	115,33	35,53%	1.303,18	220,42	16,91%	-47,68%
Belanja Transfer	3.552,39	601,42	16,93%	3.888,05	528,17	13,58%	13,87%
Belanja Bagi Hasil	1.256,42	19,99	1,59%	1.418,91	14,03	0,99%	42,47%
Belanja Bantuan Keuangan	2.295,97	581,42	25,32%	2.469,14	514,14	20,82%	13,09%
SURPLUS/(DEFISIT)	(3.227,06)	1.648,80	-51,09%	(3.455,47)	2.920,05	-84,51%	-43,54%
PEMBIAYAAN	3.227,14	1.026,60	31,81%	2.810,47	1.665,93	59,28%	-38,38%
Penerimaan Pembiayaan	3.321,98	1.063,57	32,02%	2.725,85	1.707,04	62,62%	-37,70%
SiLPA	2.954,81	1.045,08	35,37%	2.228,95	1.638,91	73,53%	-36,23%
Pencairan Dana Cadangan	-	-		204,05	36,33	17,81%	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-		-	0,03		-
Penerimaan Pinjaman Daerah	358,66	18,40	5,13%	282,85	31,76	11,23%	-42,07%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	8,52	0,08	0,99%	10,00	0,01	0,08%	956,25%
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-		-	0,01		-
Pengeluaran Pembiayaan	94,84	36,96	38,97%	84,62	41,11	48,58%	-10,08%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo	43,14	11,86	27,50%	15,37	-	0,00%	
Penyertaan Modal Daerah	28,20	2,10	7,45%	47,80	22,95	48,01%	-90,85%
Pembentukan Dana Cadangan	10,00	-	0,00%	-	-		
Pemberian Pinjaman Daerah	13,50	10,00	74,07%	21,45	10,00	46,62%	0,00%
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	13,00		-	8,16		59,40%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	0,06	2.675,40		(645,00)	4.585,98		

4. Belanja APBD Per Fungsi Semester I 2021

Fungsi	TOTAL Triwulan II 2021		
	Pagu	Realisasi	%
Pelayanan Umum	6.682.992.151.683	2.600.954.837.984	38,92%
Ketertiban dan Keamanan	356.067.382.362	152.888.429.357	42,94%
Ekonomi	1.599.815.381.703	656.819.931.832	41,06%
Lingkungan Hidup	664.370.366.291	155.512.162.404	23,41%
Perumahan dan Fasilitas Umum	3.584.666.535.321	836.836.742.483	23,34%
Kesehatan	4.850.346.746.877	1.604.932.991.154	33,09%
Pariwisata	119.100.124.292	30.721.147.988	25,79%
Pendidikan	6.832.265.041.704	2.761.062.740.760	40,41%
Perlindungan Sosial	428.141.227.739	146.122.899.221	34,13%
Total	25.117.764.957.972,00	8.945.851.883.183	35,62%

5. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Periode Semester I 2020 dan 2021

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	JUMLAH (Semester I 2021)	JUMLAH (Semester I 2020)
	Transaksi yang mempengaruhi kekayaan neto		
A1	Pendapatan:	19.078.115.756.563	20.443.673.359.779
A11	Pajak	5.325.528.785.946	5.009.023.705.462
A12	Kontribusi sosial		0
A13	Hibah	136.880.769.236	875.373.306.120
A14	Pendapatan lain	13.615.706.201.380	14.559.276.348.197
A2	Beban:	11.561.400.774.986	12.301.715.909.742
A21	Kompensasi pegawai	6.025.974.119.529	5.308.219.655.019
A22	Penggunaan barang dan jasa	3.091.072.133.828	3.246.947.321.672
A23	Konsumsi aset tetap		0
A24	Bunga	1.947.681.494	190.321.589
A25	Subsidi		0
A26	Hibah	1.871.595.454.622	3.062.772.118.916
A27	Manfaat sosial	26.643.433.000	42.203.216.256
A28	Beban Lainnya	544.167.952.513	641.383.276.290
NOB	Keseimbangan operasi bruto/neto	7.516.714.981.577	8.141.957.450.037
A3	Transaksi Aset Non Keuangan Neto	1.466.670.047.542	
KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH		
	Transaksi yang mempengaruhi kekayaan neto		
A311	Aset tetap	1.425.950.268.608	1.043.895.140.803
A312	Persediaan		0
A313	Barang berharga		0
A314	Aset nonproduksi	40.719.778.934	15.939.092.449
	Net Lending/Borrowing	6.050.044.934.035	7.082.123.216.785
	Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban		
a	Akuisisi Neto Aset keuangan	6.056.579.291.311	7.113.883.061.560
	Domestik	6.056.579.291.311	7.113.883.061.560
	Luar Negeri	0	0
b	Keterjadian Kewajiban	6.534.357.276	31.759.844.775
	Domestik	6.534.357.276	31.759.844.775
	Luar Negeri	0	
PDRB Tiwulan II 2021		47.600.000.000.000	43.860.000.000.000
	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (G) = A21+A22+A23+A27	9.143.689.686.357	8.597.370.192.947
Kontribusi belanja Pemerintah terhadap PDRB		19,21%	19,60%
PMTB =A311		1.425.950.268.608	1.043.895.140.803,00
Kontribusi investasi Pemerintah terhadap PDRB		3,00%	2,38%

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2020. Banjarbaru.

Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.

Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik Nasional.

Kajian Fiskal Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahunan 2020

Kajian Fiskal Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II Tahun 2020

Kajian Fiskal Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2021

Organization for Economic Coordination and Development. G-20 GDP Growth Quarterly National Accounts, OECD 2021, Paris 10 June 2021.

Organization for Economic Coordination and Development. OECD Economic Survey: Indonesia 2021. March 2021.

Wei, William W.S. (2013). *Time Series Analysis Solution Manual*. Diambil dari <https://www.slideshare.net/AdrianJohn8/time-seriesanalysisissolutionmanualbywilliamwei>

Wei, William W.S. *Time Series Analysis Univariate and Multivariate Methods*. Departement of Statistic The School of Bussiness and Management Temple University. Diambil dari <http://civil.colorado.edu/~balajir/CVEN6833/lectures/wwts-book.pdf>